

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN INDEKS  
TRANSPARANSI OPZ (STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
BAZNAS KULON PROGO DAN DOMPET DHUAFa  
YOGYAKARTA)**

*Zakat Management Transparency with OPZ Transparency Index  
(Comparative Study between BAZNAS Kulon Progo and Dompot  
Dhuafa Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

ARUM MAULINA

16423050

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 September 2020  
Nama : ARUM MAULINA  
Nomor Mahasiswa : 16423050  
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi OPZ  
(Studi Perbandingan antara BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI

#### Ketua

Tulasmu, SEI, MEI

 .....

#### Penguji I

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

 .....

#### Penguji II

Junaidi Safitri, SEI, MEI

 .....

#### Pembimbing

Rakhmawati, S.Stat, MA

 .....

Yogyakarta, 10 September 2020





**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arum Maulina

NIM : 16423050

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks  
Transparansi OPZ (Studi Perbandingan antara BAZNAS  
Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020



Arum Maulina

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Arum Maulina

NIM : 16423050

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Perbandingan antara BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020



Rakhmawati, S.Stat., MA

## NOTA DINAS

**Hal** : **Skripsi**  
**Kepada** : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 707/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2020 tanggal 18 April 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Arum Maulina  
Nomor/Pokok NIM : 16423050  
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Perbandingan antara BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2020



Rakhmawati, S.Stat., MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas demi tugas perkuliahan, salah satunya tugas akhir/skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya.

Kepada kedua orang tua saya, terimakasih atas do'a, ridho, dukungan, dan motivasi dari ibu dan bapak sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridho-Nya kepada kalian kedua orang tuaku tersayang.

Terimakasih untuk anggota keluargaku (nenek, kakak, mbakyu, keponakan, sepupu) yang telah mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada Ibu Rakhmawati, S.Stat., M.A., selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman, sahabat-sahabatku terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu dan didikannya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan anda semua dan dilancarkan segala sesuatunya. Aamiin

## MOTTO

Allah SWT berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya : "*Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.*"

(QS. Al-Baqarah : 152)

*“Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup”*

(HR. Bukhari & Muslim)

*“Just because your dua wasn’t answered immediately, doesn’t mean that it’s not in your qadr. Maybe Allah is delaying it to test your sabr”*

(A. Helwa)

## ABSTRAK

### TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN INDEKS TRANSPARANSI OPZ (STUDI PERBANDINGAN ANTARA BAZNAS KULON PROGO DAN DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA)

ARUM MAULINA

16423050

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting diperhatikan pada organisasi pengelola zakat (OPZ), sebab OPZ merupakan organisasi yang mengelola dana publik. Sebagai pengelola dana publik, tentu harus melaporkan terkait zakat yang dikelolanya sebagai bentuk transparansi dari OPZ tersebut, karena hal itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi pengelolaan zakat berdasarkan indeks transparansi OPZ di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan *simple additive weighting* yang berpedoman pada Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, dengan mengambil sampel 1 BAZNAS dan 1 LAZ yang ada di Yogyakarta yakni BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada indeks transparansi keuangan (I-TK01) BAZNAS Kulon Progo memperoleh nilai sebesar 0,21 dan Dompot Dhuafa Yogyakarta memperoleh nilai 0,24. Pada Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02), BAZNAS Kulon Progo memperoleh nilai 0,23 dan DD Yogyakarta memperoleh nilai 0,24. Pada Indeks Transparansi Program (I-TP03), BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar 0,32. Setelah nilai ketiga indeks dijumlahkan, maka diperoleh hasil akhir nilai Itranz dari BAZNAS Kulon Progo sebesar 0,76 yang termasuk dalam kriteria “Transparan”, serta Dompot Dhuafa Yogyakarta memperoleh nilai Itranz sebesar 0,8 dengan kriteria “Transparan”.

***Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Indeks Transparansi OPZ, BAZNAS Kulon Progo, Dompot Dhuafa Yogyakarta***

## ABSTRACT

### ZAKAT MANAGEMENT TRANSPARENCY WITH OPZ TRANSPARENCY INDEX (COMPARATIVE STUDY BETWEEN BAZNAS KULON PROGO AND DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA)

ARUM MAULINA  
16423050

Accountability and transparency are very important to be concerned in zakat management organizations (OPZ) as this organization manages public funds. As managing a public fund, it certainly must report the zakat it manages as a form of transparency considering that this has a significant effect on the level of trust of the Muzakki. In turn, the purpose of this study is to determine the transparency of zakat management based upon the OPZ transparency index in BAZNAS Kulon Progo Regency and Dompot Dhuafa Yogyakarta. This is a descriptive-quantitative research using the calculation of simple additive weighting method based on the BAZNAS Strategic Studies Center (PUSKAS), by taking samples of 1 BAZNAS and 1 LAZ in Yogyakarta, namely BAZNAS Kulon Progo and Dompot Dhuafa Yogyakarta. From the results of the research conducted, it was found that the financial transparency index (I-TK01) BAZNAS Kulon Progo obtained a value of 0.21 and Dompot Dhuafa Yogyakarta obtained a value of 0.24. In the Management Transparency Index (I-TM02), BAZNAS Kulon Progo obtained a value of 0.23 and Dompot Dhuafa Yogyakarta obtained a value of 0.24. In the Program Transparency Index (I-TP03), BAZNAS Kulon Progo and DD Yogyakarta received the similar same score 0.32. After the three index values were accumulated, the final Itranz score from BAZNAS Kulon Progo was obtained at 0.76 included in the "Transparent" criteria, and Dompot Dhuafa Yogyakarta obtained an Itranz score of 0.8 with the criteria "Transparent".

***Keywords: Zakat Management, OPZ Transparency Index, BAZNAS Kulon Progo, Dompot Dhuafa Yogyakarta***

August 26, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

# **PEDOMAN TRANSLITERASI**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

#### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

##### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan Islam pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	A dan I
... وَ	fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَتَبَ Kataba  
فَعَلَ fa'ala

### 1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِ...ِ	fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
... يِ	kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
... وَ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

## 2. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada 2 (dua) :

- a. Ta'marbutah hidup  
Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta'marbutah mati  
Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-اتفāl
	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
	al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	Talhah

## 3. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعْمَ	nu'ima
الْبِرِّ	al-birr		

#### 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda samping.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	القَلَمُ	al-qalamu
السَّيِّدُ	as-sayyidu	البَدِيعُ	al-badī'u
الشَّمْسُ	as-syamsu	الجَلَالُ	al-jalālu

## 5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٍ	syai'un	أَكَلَ	Akala

## 6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti  
manistatā’a ilaihi sabila

سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti  
manistatā’a ilaihi sabīlā

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi  
lallażi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lażi unzila fīh al-

Qur'ānu

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil

Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin Ya Robbal 'alamin.

Skripsi dengan judul “Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Perbandingan antara BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)” telah penyusun selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna, namun berkat do'a, dukungan, dan motivasi dari orang sekitar penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan dengan baik. Maka dari itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rakhmawati, S.Stat., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun dengan berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
6. Bapak Abdul Kholik dan Ibu Suharnaningsih, selaku orang tua penyusun. Terimakasih telah merawat, mendidik, membesarkan, serta selalu mendo'akan dan mendukung segala aktivitas penyusun sampai saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan senantiasa membantu penyusun dengan mempermudah dalam mengurus segala administrasi mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Nenek Sukiyem, Hilman Shofia dan Nurkamalasari, selaku saudara kandung penyusun serta anggota keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun ketika mengerjakan skripsi ini.
9. Kantor BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman dekat atau sahabat (Bopung Squad : Anniza, Rezka, Angel, Feby, Ola), Zidta, Gita, Theresa, Diasti, Sri Wahyuni, dan Bella yang saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memudahkan dan ridhai segala urusan kalian.
11. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2016, sukses selalu untuk kalian semua, semoga bisa mewujudkan cita-cita dan impian kalian. Semangat!

Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun

menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penyusun berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak terkait.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Tegal, 9 Agustus 2020

Penyusun,



Arum Maulina



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	10
A. Telaah Pustaka .....	10
B. Landasan Teori .....	14
1. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Islam .....	14
a. Akuntabilitas .....	14
b. Transparansi .....	17
2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) .....	21
a. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat .....	21

b.	Asas Pengelolaan Zakat .....	21
c.	Syarat Teknis Organisasi Pengelola Zakat.....	22
3.	Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat .....	22
a.	Pengertian Indeks Transparansi OPZ.....	22
b.	Komponen Indeks Transparansi OPZ.....	23
c.	Rumus Perhitungan Indeks Transparansi OPZ.....	27
d.	Kategori Penilaian Indeks Transparansi OPZ.....	29
C.	Kerangka Berfikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
A.	Desain Penelitian .....	32
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C.	Objek Penelitian.....	33
D.	Populasi dan Sampel.....	33
E.	Sumber Data.....	34
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
G.	Definisi Operasional Variabel.....	34
H.	Instrumen Penelitian .....	36
I.	Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
A.	Gambaran Umum BAZNAS Kulon Progo .....	39
1.	Sejarah Berdirinya BAZNAS Kulon Progo.....	39
2.	Visi Misi BAZNAS Kulon Progo .....	40
3.	Struktur Organisasi BAZNAS Kulon Progo.....	40
B.	Gambaran Umum Dompot Dhuafa Yogyakarta.....	41
1.	Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	41
2.	Visi Misi Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	43
3.	Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	43
C.	Analisis Hasil Pengukuran Indeks Transparansi OPZ.....	44
1.	Indeks Transparansi Keuangan .....	44
a.	Publikasi Laporan Keuangan .....	45
b.	Laporan Keuangan .....	46
2.	Indeks Transparansi Manajemen .....	47
a.	Tata Kelola.....	47
b.	<i>Company Profile</i> .....	49
c.	PID .....	49
d.	Saluran Pengaduan.....	50
3.	Indeks Transparansi Program.....	51
a.	Aktivitas <i>Real-time</i> .....	51

b. Database Muzaki dan Mustahik.....	52
c. Data Penghimpunan dan Data Penyaluran.....	53
D. Perhitungan Nilai Indeks Transparansi OPZ .....	54
1. Nilai Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01) .....	54
2. Nilai Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02) .....	56
3. Nilai Indeks Transparansi Program (I-TP03).....	57
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
1. Implementasi Transparansi I-TK01 .....	59
2. Implementasi Transparansi I-TM02.....	61
3. Implementasi Transparansi I-TP03 .....	63
BAB V KEISMPULAN DAN SARAN .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS secara Nasional Tahun 2018.....	2
Tabel 2.1 Komponen Indeks Transparansi OPZ.....	23
Tabel 2.2 Kategori Penilaian Indeks Transparansi OPZ.....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Indeks Transparansi OPZ.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 4.1 Nilai Variabel Publikasi Laporan Keuangan.....	45
Gambar 4.2 Nilai Variabel Laporan Keuangan .....	46
Gambar 4.3 Nilai Variabel Tata Kelola .....	48
Gambar 4.4 Nilai Variabel Company Profile.....	49
Gambar 4.5 Nilai Variabel Portal Informasi dan Dokumentasi Publik .....	50
Gambar 4.6 Nilai Variabel Saluran Pengaduan .....	51
Gambar 4.7 Nilai Variabel Aktivitas Real-time.....	52
Gambar 4.8 Nilai Variabel Database Muzaki dan Mustahik .....	53
Gambar 4.9 Nilai Variabel Data Penghimpunan dan Penyaluran.....	54
Gambar 4.10 Hasil Perhitungan Nilai Itranz.....	55
Gambar 4.11 Total Nilai Indeks Transparansi OPZ .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu masalah sosial-ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam Islam, semua permasalahan yang dihadapi oleh umat sudah pasti ada solusinya. Sebab Islam adalah agama yang sempurna dan rahmatan lil'alam. Demikian salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengeluarkan zakat. Bukan hanya sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan, Allah menjadikan taubat, shalat, dan zakat sebagai penguat ukhuwah (persaudaraan antarumat Islam) (Bahammam, 2015). Termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mensucikan harta setiap umat muslim yang bernyawa dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk kaum Muslim yang membutuhkan di mana syarat-syarat, perhitungan dan peruntukannya telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 adalah salah satu bukti nyata jatuhnya ekonomi berbasis riba. Pada masa itulah adanya bank syariah yang masih bertahan dalam kondisi tersebut sehingga menginspirasi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan instrument Hukum Ekonomi Islam salah satunya dengan memberdayakan zakat (Purbasari, 2015). Demikianlah salah satu tonggak sejarah pengelolaan zakat di Indonesia yang modern melalui kelembagaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dibagi menjadi 2 yakni organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan kementerian Agama yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). BAZNAS

hampir ada disetiap daerah di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Sedangkan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bertugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dana zakat. Kedua badan/lembaga tersebut telah mendapatkan payung hukum dari pemerintah (Dzajuli, 2002). Dengan adanya lembaga-lembaga zakat di Indonesia diharapkan dapat membantu pengelolaan zakat di Indonesia sesuai tuntunan syariat Islam sehingga dapat menyejahterakan kehidupan ekonomi umat agar tidak terus terbelenggu pada kemiskinan.

Potensi zakat, infaq, shadaqah (ZIS) sangat besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data terbaru jumlah pengumpulan dan penyaluran dana ZIS secara nasional pada tahun 2018 berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Data ini termuat dalam *Outlook Zakat Indonesia 2020* yang ditulis oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. Berikut tabel pengumpulan dan penyaluran dana ZIS tahun 2018 yang telah dipaparkan berdasarkan perhitungan Statistik Zakat Indonesia oleh BAZNAS.

**Tabel 1.1 Pengumpulan & Penyaluran Dana ZIS Nasional Tahun 2018**

No	Bidang	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya Serap
1	BAZNAS	206.374.175.575	2,54	235.664.651.030	3,47	114,19 %
2	BAZNAS Provinsi	552.209.167.922	6,8	462.230.919.380	6,8	83,71 %
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	3.171.701.720.388	39,07	2.490.478.790.649	36,62	78,58 %
4	LAZ	3.634.332.619.382	44,77	3.100.034.381.065	45,59	85,30 %
5	OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan	552.980.000.000	6,81	511.730.391.073	7,53	92,54 %
TOTAL		8.117.597.683.267	100	6.800.139.133.196	100	83,77 %

Sumber: Data sekunder diolah BAZNAS (2019)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 secara kumulatif total pengumpulan dana ZIS secara nasional mencapai 8,1 Triliun rupiah dan dengan jumlah penyaluran mencapai 6,8 Triliun rupiah. Sehingga didapatkan tingkat daya serap/ACR (*Allocation to Collection Ratio*) sebesar 83,77% yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penyerapan dana ZIS termasuk dalam kategori “efektif” baik dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, maupun OPZ dalam pembinaan kelembagaan yang masing-masing memiliki tingkat daya serap diatas 70%. (BAZNAS, 2020)

Dengan adanya potensi dana zakat yang tinggi di Indonesia dan dikelola dengan baik, maka hal tersebut membuat keberadaan BAZNAS dan LAZ sangat dirasakan kontribusinya dalam masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan melalui program-program pendayagunaan zakat dari BAZNAS dan LAZ, maka langkah tersebut dapat membantu kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dhuafa. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, pengelolaan zakat juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Semangat OPZ dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dilihat melalui program-program usaha yang produktif, sehingga dapat meringankan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu juga tidak terlepas dari kesadaran dan kebaikan hati para muzakki yang telah mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh amil yang profesional, transparan, amanah, dan akuntabel (Endahwati, 2014).

Akuntabilitas dan transparansi OPZ berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Budi, Widodo, & Enita, 2019). Oleh karena itu, para muzakki yang membayarkan zakatnya melalui badan/lembaga zakat harus sangat diperhatikan, sebab salah satu pengaruh besar bagi lembaga zakat adalah kepercayaan muzakki. Jika muzakki telah mempercayakan zakatnya untuk dikelola lembaga tersebut, maka mereka tentu akan membayarkan zakatnya terus menerus melalui

badan/lembaga zakat sehingga berpengaruh pada peningkatan pemasukan dana zakat. Oleh karena itu, BAZ/LAZ harus berupaya untuk mempertahankan para muzakki yang mereka miliki sehingga terbentuk loyalitas muzakki (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Namun ada pula sebagian muzakki yang masih belum mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada BAZ/LAZ. Mereka lebih ingin menyalurkannya sendiri langsung dari tangan mereka tanpa perantara. Menurut Husein Umar (2000), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan, yaitu kredibilitas, kompetensi, serta sikap. Dalam konteks lembaga amil zakat, kredibilitas dapat dilihat pada transparansi yang dilakukan oleh BAZ/LAZ, kompetensi dilihat dari bagaimana BAZ/LAZ dalam mengelola zakat, dan sikap dapat dilihat dari lembaga zakat itu sendiri baik penampilan lahiriah maupun moral amil (Nasim & Romdhon, 2014).

Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi yang mengelola dana publik. Sebagai pengelola dana publik, tentu harus melaporkan terkait zakat yang dikelolanya sebagai bentuk transparansi dari OPZ tersebut. Sebab pemenuhan tuntutan tata kelola pada masa kini yang terkait dengan penegakan *good governance* yakni salah satunya adalah dengan adanya pelaporan sumber daya kepada publik (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Pengelolaan apapun yang bentuknya memanfaatkan sumber daya publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan alokasi dana zakat meliputi pelaporan atas seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan zakat yang dikelola. Dengan demikian, dana zakat harus dikelola secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, serta bertanggungjawab agar dapat membuat pelaporan yang transparan dan akuntabel (Kemenag RI, 2013).

Industri perzakatan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak munculnya lembaga-lembaga

pengelola zakat. Namun belum ada alat ukur yang relevan untuk mengukur tingkat transparansi organisasi pengelola zakat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan suatu indeks pengukur transparansi bagi pengembangan perzakatan Indonesia di masa depan agar mampu menginterpretasikan kondisi dan performa riil sebuah lembaga pengelola zakat. Keunggulan mengukur transparansi pengelolaan zakat menggunakan ITRANZ ini antara lain ITRANZ adalah instrument yang disusun oleh lembaga riset zakat terdepan di bawah BAZNAS yakni Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. Untuk membangun *expert judgment* dalam menyusun indeks transparansi ini dilakukan dalam forum diskusi terfokus bersama para ahli/ pakar dibidang zakat. Hasil temuan kajian tersebut berupa 3 dimensi yakni transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program. Dari ketiga dimensi tersebut terdapat beberapa variabel dan indikator-indikator yang sangat relevan untuk mengukur tingkat transparansi di OPZ. Indeks transparansi OPZ juga selaras dengan dokumen standar internasional seperti *Zakat Core Principles No. 17* tentang *Disclosure and transparency*, *Zakat Core Principles No. 8* tentang *Good Amil Governance*, *Zakat Core Principles No. 5* tentang *Supervisory technique and tools*, *Zakat Core Principles No. 9* tentang *Collection management*, dan *Zakat Core Principles No. 10* tentang *Disbursement management* (BAZNAS, 2019).

Pusat Kajian Strategis BAZNAS baru merilis hasil riset terkait indeks transparansi OPZ pada bulan Desember 2019, jadi penelitian ini merupakan sebuah kebaruan karena sebelumnya belum ada yang meneliti tentang indeks transparansi OPZ yang merupakan hasil riset PUSKAS BAZNAS ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat turut berkontribusi untuk lebih meningkatkan kepercayaan para muzakki terhadap tata kelola dana zakat di Indonesia.

Sampel penelitian ini diambil dari salah satu BAZNAS dan LAZ yang ada di Yogyakarta, yaitu BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan

LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta. Pada studi perbandingan ini penulis tidak menggunakan sampel BAZ/LAZ yang cakupannya tingkat provinsi antara kedua lembaganya, sebab penelitian ini dilakukan pada saat awal pandemi covid-19 dimana BAZNAS provinsi atau kota Yogyakarta tidak bersedia dijadikan objek penelitian, maka penulis memilih BAZNAS Kabupaten Kulon Progo yang siap dijadikan objek penelitian dan Kabupaten Kulon Progo juga berada dalam provinsi Yogyakarta.

Dari hasil pengamatan pada website dan media sosial BAZNAS Kabupaten Kulon Progo, peneliti menemukan bahwa informasi tentang perkembangan pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat cukup *update* dan mudah diakses oleh publik. Namun laporan keuangan BAZNAS Kulon Progo tidak dipublikasi ke website ataupun media sosialnya. Sedangkan pada LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta pada akun media sosialnya juga sangat aktif meng*update* perkembangan program dari dana zakat yang dikelolanya. Namun sama halnya seperti BAZNAS Kulon Progo, Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak melakukan publikasi laporan keuangan baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran pada website atau media sosialnya. Laporan keuangan penting dilihat, sebab mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat transparansi (Fernando, 2018). Pengungkapan keuangan dalam hal aspek transparansi ditentukan oleh pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, kualitas sistem audit terkait pengungkapan dan pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu pelaporan (BAZNAS, 2019).

Dengan demikian, hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta. Peneliti berharap dapat meneliti lebih dalam terkait transparansi dari sisi keuangan, manajemen serta program dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi**

## **OPZ (Studi Perbandingan antara BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Inti dari latar belakang di atas yaitu Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi yang mengelola dana publik. Sebagai pengelola dana publik, tentu harus melaporkan terkait zakat yang dikelolanya sebagai bentuk transparansi dari OPZ tersebut. Pengelolaan apapun yang bentuknya memanfaatkan sumber daya publik maka harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga riset zakat terdepan, Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS merumuskan indeks transparansi OPZ meliputi 3 dimensi yang diukur, yakni dimensi transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program. Indeks pengukur transparansi ini penting bagi pengembangan perzakatan Indonesia di masa depan agar mampu menginterpretasikan kondisi dan performa riil sebuah lembaga pengelola zakat. Hal inilah yang membuat peneliti ingin menganalisis indeks transparansi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta serta berharap dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki terhadap tata kelola dana zakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana implementasi transparansi pengelolaan zakat berdasarkan indeks transparansi OPZ di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui transparansi pengelolaan zakat berdasarkan indeks transparansi OPZ di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yakni:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dengan adanya penelitian tentang indeks transparansi OPZ maka dapat menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya terkait transparansi tata kelola zakat.
- b. penelitian ini diharapkan mampu untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan dana zakat oleh OPZ di Indonesia.

### 2. Manfaat praktis

- a. Menambah pandangan dan pengetahuan bagi para pegawai Organisasi Pengelola Zakat terkait indeks tranparansi OPZ
- b. Lembaga dapat mengetahui sejauh mana indeks transparansi yang diterapkan selama ini, jika dinilai kurang transparan maka lembaga dapat memperbaiki kinerja serta sistem pengelolaannya.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh terkait penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian berikut ini :

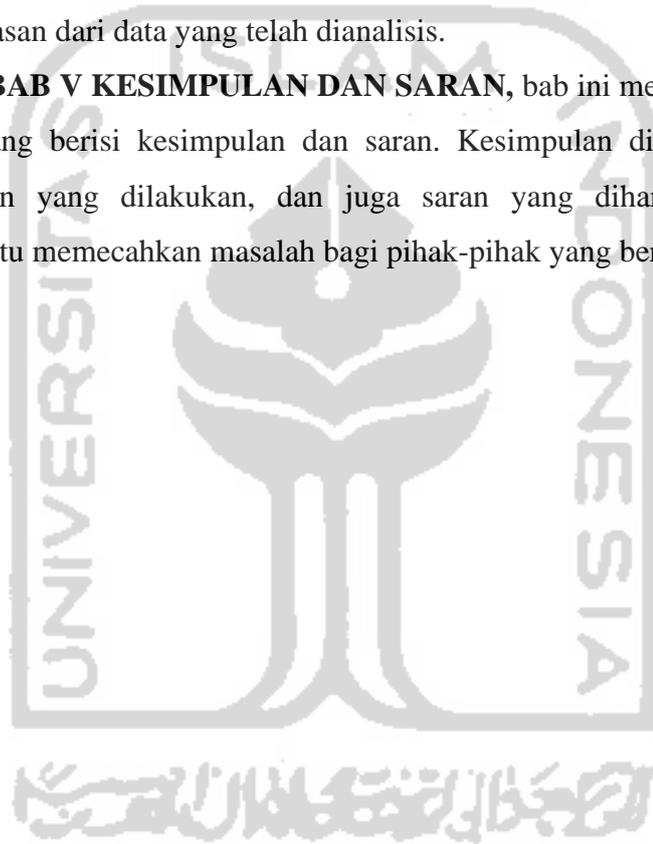
**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini mengandung sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

**BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**, dalam bab ini mengandung sub bab yang meliputi telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka berfikir. Pada telaah pustaka, berisi ringkasan penelitian sebelumnya terkait topik penelitian. Ada delapan penelitian sebelumnya yang dijadikan telaah pustaka pada penelitian ini. Sedangkan pada landasan teori, penulis memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yakni tentang akuntabilitas dan transparansi dalam Islam, organisasi pengelola zakat, dan teori indeks transparansi OPZ.

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ketiga ini mengandung sub bab yang meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini berisi gambaran umum dari objek yang diteliti, analisis data, serta pembahasan dari data yang telah dianalisis.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan, dan juga saran yang diharapkan mampu membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Terdapat berbagai macam literatur yang menjadi referensi penelitian ini baik berupa buku, jurnal, maupun hasil riset yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Banyak penelitian terdahulu terkait dengan topik transparansi lembaga zakat, namun belum ada penelitian tentang indeks transparansi OPZ. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sebuah kebaruan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang sudah terangkum dalam telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Georgette E. Dumont dengan judul “*Nonprofit Virtual Accountability: An Index and Its Application*”. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan *Non Profit Virtual Accountability Index* (NPVAI) sebagai alat bagi organisasi nirlaba untuk membuat rencana strategis terkait pertanggungjawaban secara online, dan berguna untuk menganalisis situs web organisasi nirlaba. Terdapat 5 komponen kunci pada indeks ini dalam mengukur *web based accountability* lembaga nirlaba/non profit, yakni meliputi *accessibility* (aksesibilitas), *engagement* (keterlibatan), *performance* (kinerja), *governance* (pemerintahan), dan *mission* (misi) (Dumont, 2013).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufikur Rahman dengan judul “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa apakah LAZ sudah menerapkan PSAK 109 terkait Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Sebab hal tersebut terkait salah satu instrument yang digunakan OPZ dalam menciptakan sistem tata kelola dana zakat yang baik (*good zakat governance*) yang memiliki karakteristik transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan zakat yang didalamnya termasuk pengelolaan infak, sedekah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif,

yang menjelaskan terkait standar akuntansi ZIS (PSAK No. 109) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian OPZ saat ini masih belum menerapkan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan, mereka masih membuat laporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk pelaporan setiap OPZ berbeda-beda. Jadi letak permasalahannya berasal dari SDM yang dimiliki OPZ sehingga menjadi kendala belum diterapkannya PSAK 109 di OPZ (Rahman, 2015).

Ketiga, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Asminar dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Binjai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung tentang pemahaman, transparansi, dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan menyalurkan zakat di BAZNAS Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis statistika menggunakan program SPSS Versi 16 dengan jalur model regresi linier berganda. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa nilai koefisien determinasi model struktural 1 sebesar 60,6% menunjukkan pemahaman, transparansi, dan peran pemerintah terhadap motivasi memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan nilai koefisien determinasi model struktural 2 sebesar 94,8% menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah, serta motivasi terhadap keputusan muzakki juga memiliki pengaruh signifikan (Asminar, 2017).

Keempat, penelitian terdahulu dari Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel diantaranya adalah kepuasan muzakki, transparansi, dan akuntabilitas pada lembaga zakat terhadap loyalitas muzakki. Dalam meningkatkan loyalitas muzakki,

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi nonprofit perlu memperhatikan kepuasan muzakki, transparansi, dan akuntabilitas. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan kuesioner yang dijawab oleh muzakki Rumah Zakat, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kepuasan muzakki dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Berarti, semakin tinggi kepuasan muzakki dan transparansi LAZ maka semakin tinggi juga loyalitas muzakki. Sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Kelima, penelitian terdahulu dari Gregory D. Saxton dan Chao Guo yang berjudul “*Accountability Online: Understanding the Web-based Accountability Practice of Nonprofit Organization*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka konseptual yang menggunakan dua dimensi dari praktik akuntabilitas berbasis web, yaitu *disclosure* (pengungkapan) dan *dialogue* (komunikasi). Dari dua dimensi tersebut, Saxton & Guo membaginya menjadi 4 indikator. Dari dimensi disclosure memiliki 2 indikator, yaitu *disclosure of performance* (pengungkapan kinerja) dan *disclosure of finances* (pengungkapan keuangan). Sementara 2 indikator lainnya dari dimensi dialogue yaitu komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan dengan organisasi dan masukan para pemangku kepentingan (Saxton & Guo, 2011).

Keenam, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rani Rahmat, Anantawikrama, dan Ni Luh Gede Sulindawati yang berjudul “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berasal darimana saja sumber dana yang dikelola oleh BAZNAS Buleleng, kemudian bagaimana pemanfaatan pengelolaan dana oleh BAZNAS Buleleng, serta mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS pada BAZNAS Buleleng. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data

*Miles and Huberman*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzaki dan mustahik (Rahmat, Atmaja, & Sulindawati, 2017).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memaknai akuntabilitas dalam mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan *case study*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BAZ Kabupaten Lumajang, akuntabilitas pengelolaan ZIS didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pada akuntabilitas vertikal menekankan prinsip amanah. Sedangkan untuk akuntabilitas horizontal menekankan prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, layanan, program, dan laporan yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang (Endahwati, 2014).

Kedelapan, penelitian terdahulu terkait transparansi OPZ dilakukan oleh Septi Budi, Sri Widodo, dan Enita dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Masjid Jogokariyan menerbitkan buletin secara berkala yang didalamnya terdapat pelaporan zakat. Jamaah Masjid Jogokariyan sebagai populasi dalam penelitian ini, sedangkan sampelnya adalah muzakki di Institut Amil Zakat

Masjid Jogokariyan yang berjumlah 50 responden. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan validitas, reliabilitas, serta regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi LAZ terhadap tingkat kepercayaan muzakki memiliki pengaruh yang signifikan (Budi, Widodo, & Enita, 2019).

## B. Landasan Teori

### 1. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Islam

#### a. Akuntabilitas

Menurut KBBI, akuntabilitas merupakan perihal bertanggung jawab; keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban (KBBI, 2020). Akuntabilitas dapat dimaknai bahwa pemegang amanah (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan setiap aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut yakni dari pihak pemberi amanah (*principal*) (Mahsun, Sulistyowati, & Heribertus, 2007).

Dalam pandangan Islam, akuntabilitas meliputi dua arah, yaitu akuntabilitas dihadapan Sang Pencipta yakni Allah SWT (*hablumminallah*), dan akuntabilitas dhadapan manusia (*hablumminannas*). sebab apa saja yang sudah Allah titipkan kepada manusia, itu termasuk amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan kelak di akhirat apa yang telah ia perbuat/kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. Al-Mudassir: 38)

Adapun pentingnya menjaga amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terdapat dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 58 bahwa Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

Didalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanah tersebut antara lain menyangkut hak-hak Allah Swt atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, puasa, zakat, kafarat, semua jenis nazar dan juga amanah berupa hak-hak seseorang kepada orang lain seperti titipan atau semacamnya. Allah juga memerintahkan untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala perbuatan manusia (Katsir, 2003).

Dalam konteks pengelolaan zakat, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amil sebagai pemegang amanah kepada muzakki sebagai pemberi amanah. Maka, amil harus menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya yakni 8 asnaf sebagaimana telah diterangkan dalam al-Qur'an serta harus mengelola zakat sesuai tuntunan syari'at Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan muzakki yang telah memberinya amanah.

Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi/lembaga nirlaba. Akuntabilitas dianggap hal yang penting sebab organisasi nirlaba lebih

banyak melibatkan stakeholder, yang mana pengelolaan harus mempunyai tanggungjawab dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang dapat dipercaya. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik dalam mencapai tujuan (Nordiawan, 2009).

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh (2009), ada tiga indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, maka segala aktivitas/kegiatannya harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat
- 2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan seadil mungkin
- 3) Aktivitas organisasi dilarang merusak lingkungan sekitar

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang sama-sama menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional. Transparansi juga merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas. Adapun dari segi akuntansi, akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk menghasilkan sebuah pengungkapan yang nyata/benar melalui proses akuntansi. Begitu juga dengan transparansi, tata cara pelaporan akuntansi keuangan Islam dipengaruhi oleh konsep transparansi. Adapun kriteria dalam pengungkapan pelaporan akuntansi Islam yaitu persepsi akuntabilitas sosial dan aturan terkait pengungkapan. Akuntabilitas dan transparansi bagi OPZ berpedoman pada *Zakat Core Principles*, khususnya *Zakat Core Principles* nomor 17 terkait *disclosure and transparency* yakni tentang diwajibkannya melakukan publikasi atas informasi pelaporan yang mudah diakses dan juga

menggambarkan secara riil kondisi dan kinerja atas pengelolaan zakat (BAZNAS, 2019).

b. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi terkait kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil (*output*) yang telah dicapai. (Fatmawati, Nurkhasanah, & Nurdin, 2016) sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam jurnal Yuliafitri & Khoiriyah (2016), transparansi adalah keadaan dimana suatu lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan sehingga para pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses serta memahaminya.

Definisi transparansi menekankan betapa penting visibilitas. Penentuan transparansi dan keandalan sebuah laporan keuangan dapat diungkapkan melalui sebuah informasi. Menurut William, transparansi dapat didefinisikan menggunakan 3 pendekatan yaitu relevan, tepat waktu, serta keandalan. Sedangkan menurut Dubbink et. All dalam (BAZNAS, 2019) mendefinisikan bahwa transparansi mempunyai karakteristik sebagai berikut: efektivitas (memiliki hubungan positif dengan kualitas), kebebasan dan kebajikan (tentang komunikasi publik dan etika) serta kepercayaan terhadap sebuah organisasi. Dalam penelitiannya sering digambarkan bahwa transparansi sebagai komunikasi yang teliti, tidakberpihakan, dan jauh dari manipulasi. Komunikasi dan keterbukaan merupakan tujuan utama dari transparansi.

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit terkait implementasi transparansi pada pemerintahan, namun didalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana seharusnya menciptakan transparansi dijalankan dalam pemerintahan. Tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja,

namun seharusnya konsep ini juga diaplikasikan pada setiap organisasi. Adapun nilai-nilai yang berkaitan dengan hal ini antara lain yakni konsep *transparency, accountability, justice and equity*. Dalam Al-Qur'an, nilai-nilai tersebut terdapat pada Qs. Al-Baqarah(2):282, Qs. Al-Isra(17):35, dan Qs. Al-Muthaffifin(83):1-5 (BAZNAS, 2019).

Nilai transparansi yang paling utama adalah kejujuran atas segala aktivitas yang dijalankan dalam organisasi. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT menyebut dalam Qs. Al-Isra(17) ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa tidak boleh melakukan kecurangan dalam melakukan takaran seperti mengurangi timbangan orang lain, maka sempurnakanlah takaran apabila menakar, karena hal itu lebih baik akibatnya bagi kehidupan akhirat kalian (Katsir, 2003).

Dalam aktivitas yang dijalankan pada organisasi, ayat di atas menganjurkan bersikap jujur sebagai wujud nilai dari transparansi. Pada bidang manajemen zakat, prinsip transparansi berarti adanya keterbukaan dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari para muzakki yang meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian. Sedangkan dalam bidang keuangan zakat, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, serta pertanggungjawabannya (BAZNAS, 2019). Baik dalam bidang manajemen atau keuangan zakat, semua aktivitas yang ada didalamnya harus dilakukan OPZ dengan sikap jujur dan adil. Dengan demikian, membangun prinsip transparansi akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga

dan *stakeholder*, sebab tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (pengelola zakat) saja namun lebih kepada pihak eksternal (muzakki maupun masyarakat luas) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola OPZ.

Transparansi dalam gambaran Islam yakni dapat dilihat pada pola dan karakteristik kepribadian Rasulullah SAW yang sudah sering kita dengar yaitu 4 sifat berikut : *Sidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*. Syafii Antonio (2002) menjelaskan secara lebih lanjut mengenai hal ini:

- 1) *Sidiq* (benar), yang menjadi nilai dasarnya yaitu integritas. Dalam dunia bisnis, nilai-nilainya terlihat pada kejujuran, keikhlasan, terjamin, dan keseimbangan emosional.
- 2) *Tabligh*, yang menjadi nilai dasar ini yaitu komunikatif. Dalam bisnis, komunikatif terlihat pada sikap supel, gigih sebagai penjual, deskripsi tegas, delegasi wewenang, mampu bekerja tim, melakukan koordinasi, serta ada pengendalian dan supervisi.
- 3) *Amanah*, dasar nilainya yaitu dapat dipercaya. Pada dunia bisnis terungkap dari adanya kepercayaan, transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.
- 4) *Fathanah* (cerdas), dasar nilainya ialah memiliki wawasan / ilmu pengetahuan yang luas. Dalam bisnis, nilai-nilainya yaitu adanya pemimpin cerdas dan memiliki visi.

Berikut merupakan salah satu nilai mulia dalam konteks kerja organisasi yang diajarkan Rasulullah SAW:

“Dari ‘Adi bin ‘Amirah al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa yang aku pekerjakan diantara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat.*” Ia berkata : Ada orang Anshar yang berkulit

hitam berdiri, seakan-akan saya memandangnya, dan ia berkata: “Wahai Rasulullah terimalah saya bekerja.” Rasul menjawab: “*Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini*” maka Rasul berkata: “*Sekarang aku ingin berkata: barang siapa yang aku perintahkan mengerjakan suatu pekerjaan, hendaklah ia menyerahkannya semuanya; sedikit dan banyaknya. Apa yang dibeikan diambil, dan yang dilarang tinggalkan.*” (H.R. Muslim, No. 3145)

Dari hadist di atas dapat diambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki sikap transparan. Transparan berarti sikap terbuka dan hal tersebut dibutuhkan dalam setiap melakukan pekerjaan. Dalam konteks OPZ, Keterbukaan akan menghilangkan kecurigaan dan menimbulkan kepercayaan bagi muzakki. Hadist ini juga menjelaskan bahwa sekecil apapun barang yang bukan hak disembunyikan, maka di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu sikap transparansi ini sangat penting bagi OPZ sebab zakat merupakan dana umat yang setiap pengelolaannya harus dilaporkan.

Berdasarkan panduan Humanitarian Forum Indonesia (Fatmawati, Nurkhasanah, & Nurdin, 2016) terdapat 6 prinsip transparansi antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdapat informasi yang mudah diakses dan dipahami
- 2) Terdapat publikasi dan media tentang jalannya proses kegiatan
- 3) Terdapat laporan berkala terkait pendayagunaan sumber daya pengembangan proyek
- 4) Menyajikan/menyediakan laporan tahunan
- 5) Adanya media publikasi atau *website* organisasi
- 6) Terdapat pedoman dalam menyebarkan informasi

## 2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

a. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dalam lingkup nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Maksud arti pengelolaan zakat yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Manajemen yang baik pada suatu organisasi pengelola zakat dinamakan *Good Organization Governance* dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu: amanah, profesional, dan transparan (Sholahuddin, 2006). Dengan demikian, dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat, maka amil harus melakukan pengelolaan secara optimal, profesional, serta berorientasi pada tujuan zakat yakni dapat mengentaskan kemiskinan umat Muslim.

b. Asas Pengelolaan Zakat

Sebagai organisasi pengelola zakat, dalam menjalankan tugas menggunakan asas menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- 1) Berlandaskan syari'at Islam
- 2) Amanah, yakni organisasi atau lembaga harus dapat dipercaya
- 3) Kemanfaatan, dalam pengelolaan zakat harus mampu menghasilkan manfaat besar bagi mustahik
- 4) Keadilan, dalam mendistribusikan dana zakat harus dilakukan secara adil

- 5) Kepastian hukum, terdapat kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat
- 6) Terintegrasi, pengelolaan zakat dilakukan secara integrasi sebagai upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat
- 7) Akuntabilitas, yakni pengelolaan zakat harus ada pertanggungjawaban dan dapat diakses oleh masyarakat.  
(Administrator, 2016)

c. Syarat Teknis Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi pengelola zakat, diharuskan bersifat jujur dan amanah dalam melaksanakan tugasnya. Adapun menurut Undang-Undang No. 581 Tahun 1999, terdapat beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi oleh OPZ antara lain:

- 1) Organisasi pengelola zakat harus memiliki legalitas / telah memiliki badan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik terkait dengan pengumpulan dana zakat serta pendistribusiannya.
- 3) Organisasi pengelola zakat harus memiliki program pendayagunaan zakat yang jelas dan juga mempunyai strategi untuk melaksanakan programnya
- 4) Adanya pembukuan / pencatatan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 5) Melampirkan surat pernyataan untuk bersedia dilakukan audit.

3. Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengertian Indeks Transparansi OPZ

Indeks Tranparasi Organisasi Pengelola Zakat atau disingkat ITRANZ merupakan sebuah alat mekanisme yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi sebuah lembaga

pengelola zakat. Indeks Transparansi OPZ ini disusun berdasarkan *Zakat Core Principles* (BAZNAS, 2019).

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, isu transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi hal yang sangat krusial dan berdampak pada reputasi organisasi pengelola zakat. Sebagai lembaga riset zakat terdepan, PUSKAS BAZNAS membuat suatu pendekatan ilmiah yang dapat mengukur tingkat transparansi di OPZ berdasarkan 18 indikator yang sangat relevan. ITRANZ dapat dijadikan rujukan oleh otoritas zakat, OPZ, akademisi, dan para peneliti dalam mengukur sejauh mana tingkat transparansi telah diimplementasikan di OPZ. Hasil pengukuran ITRANZ diharapkan dapat menjadi sebuah *feedback* yang sangat diperlukan untuk pengelolaan zakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Komponen-komponen dalam ITRANZ terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program. Dari masing-masing dimensi dibagi menjadi 9 variabel dengan bobot kontribusinya dan didalamnya memuat 18 indikator.

b. Komponen Indeks Transparansi OPZ

Secara umum, komponen ITRANZ terbentuk oleh 3 dimensi, yaitu dimensi transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program yang masing-masing terdapat variabel beserta indikator didalamnya. Berikut ini tabel komponen indeks transparansi OPZ.

**Tabel 2.1 Komponen Indeks Transparansi OPZ**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator
1	Transparansi	Publikasi Laporan Keuangan (X1.1)	Laporan keuangan website
			Publikasi laporan keuangan media massa
			Penggunaan sistem

	Keuangan (X1)	Laporan Keuangan (X1.2)	informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) Ketepatan waktu pelaporan Opini auditor independen
2	Transparansi Manajemen (X2)	Tata Kelola (X2.1)	Terdapat standar operasional prosedur (SOP) dan standar ISO Memiliki rencana strategis tahunan Memiliki rencana kerja anggaran tahunan
		<i>Company Profile</i> (X2.2)	Adanya Struktur organisasi : profil manajemen, profil member, sistem kepegawaian
		Portal Informasi dan Dokumentasi (PID) (X2.3)	Ketersediaan portal informasi dan dokumentasi publik (PID)
		Saluran Pengaduan (X2.4)	Terdapat sistem saluran pengaduan
3		Transparansi Program (X3)	Aktivitas <i>Real-time</i> (X3.1)
	<i>Database</i> Muzakki & Mustahik (X3.2)		Memiliki <i>Database</i> muzakki individu Memiliki <i>Database</i> muzakki badan Memiliki <i>Database</i> mustahik
	Data Program Pengumpulan dan Penyaluran (X3.3)		Adanya data pengumpulan Adanya data penyaluran

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019)

Berikut penjelasan tabel komponen penyusun indeks transparansi OPZ diatas:

#### 1) Transaparansi Keuangan

Laporan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat transparansi (Fernando, 2018). Pengungkapan keuangan dalam hal aspek transparansi ditentukan oleh pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan berdasarkan

standar akuntansi yang berlaku, kualitas sistem audit terkait pengungkapan dan pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu pelaporan (BAZNAS, 2019) .

Terdapat dua variabel utama dalam dimensi transparansi keuangan yaitu publikasi laporan keuangan dan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Dari kedua variabel itu dibagi 5 indikator, yakni variabel pertama meliputi indikator laporan keuangan berbasis website dan frekuensi publikasi laporan keuangan melalui media massa. Sedangkan 3 variabel kedua yaitu penggunaan sistem informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA), ketepatan waktu pelaporan, dan opini auditor independen terkait kualitas laporan keuangan lembaga zakat (BAZNAS, 2019).

## 2) Transparansi Manajemen

Indeks transparansi manajemen terkait dengan *Zakat Core Principle* Nomor 5,8, dan 17 tentang *Good Amil Governance* dan juga *Disclosure Transparency*. Indeks transparansi manajemen juga merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa dalam undang-undang ini dijelaskan yakni informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh para pengguna informasi. Divisi Teknologi Informasi dan pelaporan Badan Amil Zakat Nasional menciptakan sebuah portal informasi dan dokumentasi bernama “SIMBA” atau Sistem Informasi BAZNAS sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sekaligus mengkoordinasi pelaporan zakat nasional. Aplikasi SIMBA ini secara nasional mengkoordinasi sistem pelaporan pengelolaan zakat, realisasi pengimpunan dan penyaluran zakat, serta kinerja operasional dari lembaga zakat.

Terdapat 4 variabel pada dimensi transparansi manajemen yaitu variabel tata kelola OPZ, struktur organisasi OPZ, Portal Informasi dan Dokumentasi (PID) OPZ, serta saluran pengaduan.

Dari 4 variabel itu terdapat 6 indikator. Variabel pertama memuat indikator ketersediaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan standar ISO (*International Organization for Standardization*), ketersediaan rencana strategis (Renstra), dan juga ketersediaan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). Sedangkan variabel kedua, ketiga, dan keempat masing-masing memuat 1 indikator yaitu ketersediaan struktur organisasi yang meliputi profil komisioner, profil manajemen dan sistem kepegawaian, ketersediaan sistem PID, serta kepemilikan sistem saluran pengaduan (BAZNAS, 2019).

### 3) Transparansi Program

Beda halnya dengan pengukuran transparansi lembaga profit maupun non profit yang lainnya, dalam indeks pengukuran lembaga zakat transparansi program diperhitungkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program penghimpunan serta penyaluran secara *realtime* yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat. Sebuah lembaga pengelola zakat wajib mempunyai database muzakki dan mustahik yang dikelola secara dengan baik. Database tersebut meliputi muzakki individual/badan, maupun detail para mustahik dalam program pendayagunaan. Transparansi program adalah salah satu hal yang sangat urgen dari bagian indeks transparansi sebab menggambarkan kinerja penghimpunan serta penyaluran riil oleh lembaga zakat.

Pada dimensi transparansi program terbagi menjadi 3 variabel, yaitu variabel aktivitas *realtime* dalam lembaga zakat, database muzakki dan mustahik, serta data program penghimpunan dan penyaluran dana zakat di OPZ. Variabel pertama terdapat 2 indikator yakni aktivitas penghimpunan dan penyaluran secara *realtime*. Sedangkan variabel kedua meliputi 3 indikator, yaitu kepemilikan database muzakki individu, muzakki badan, serta

mustahik. Kemudian variabel ketiga meliputi 2 indikator, yakni indikator data penghimpunan dan data penyaluran dana zakat.

c. Rumus Perhitungan Indeks Transparansi OPZ

Teknik estimasi perhitungan untuk mendapatkan nilai ITRANZ menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode ini merupakan pengambilan atribut ganda, dimana bobot setiap dimensi yang telah ditentukan dikalikan dengan bobot setiap variabel, setelah itu dijumlahkan. Adapun rumus perhitungan untuk memperoleh ITRANZ sebagai berikut (BAZNAS, 2019):

**Rumus 1 Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01)**

$$(01) = D_1^1 \times V_1^1 \times S + D_1^1 \times V_1^2 \times S$$

$$\text{Atau } (01) = D_1^1 (V_1^1 \times S + V_1^2 \times S)$$

Keterangan:

(01)= Dimensi transparansi keuangan

$D_1^1$  = bobot 0,39 yang dibutuhkan ke dimensi 01

$V_1^1$  = bobot 0,55 yang dibutuhkan ke variabel 1 dimensi 01

$D_1^2$  = bobot 0,45 yang dibutuhkan ke variabel 2 dimensi 01

S = nilai skala likert antara 1-5

Kemudian, menghitung hasil akhir dari indeks transparansi keuangan yakni dengan rumus:

$$I\text{-TK01} = \frac{ITK1+ITK2}{5}$$

Atau,

$$I\text{-TK01} = \frac{(01)}{5}$$

Keterangan:

$$ITK1 = D_1^1 \times V_1^1 \times S$$

$$ITK2 = D_1^1 \times V_1^2 \times S$$

**Rumus 2 Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02)**

$$(02) = D_2^2 (V_2^3 \times S + V_2^4 \times S + V_2^5 \times S + V_2^6 \times S)$$

Keterangan:

(02) = dimensi transparansi manajemen

$D_2^2$  = bobot 0,29 yang dibutuhkan ke dimensi 02

$V_2^3$  = bobot 0,32 yang dibutuhkan ke variabel 3 dimensi 02

$V_2^4$  = bobot 0,23 yang dibutuhkan ke variabel 4 dimensi 02

$V_2^5$  = bobot 0,21 yang dibutuhkan ke variabel 5 dimensi 02

$V_2^6$  = bobot 0,24 yang dibutuhkan ke variabel 6 dimensi 02

S = nilai skala likert antara 1-5

Kemudian, menghitung hasil akhir dari indeks transparansi manajemen yakni dengan rumus:

$$I\text{-TM02} = \frac{ITM3+ITM4+ITM5+ITM6}{5}$$

Atau,

$$I\text{-TM02} = \frac{(02)}{5}$$

### **Rumus 3 Indeks Transparansi Program (I-TP03)**

(03) =  $D_3^3 (V_3^7 \times S + V_3^8 \times S + V_3^9 \times S)$

Keterangan:

(03) = dimensi transparansi program

$D_3^3$  = bobot 0,32 yang dibutuhkan ke dimensi 03

$V_3^7$  = bobot 0,52 yang dibutuhkan ke variabel 7 dimensi 03

$V_3^8$  = bobot 0,23 yang dibutuhkan ke variabel 8 dimensi 03

$V_3^9$  = bobot 0,25 yang dibutuhkan ke variabel 9 dimensi 03

S = nilai skala likert antara 1-5

Kemudian, menghitung hasil akhir dari indeks transparansi program yakni dengan rumus:

$$I\text{-TP03} = \frac{ITP7+ITP8+ITP9}{5}$$

Atau,

$$I\text{-TP03} = \frac{(03)}{5}$$

Setelah, hasil dari ketiga dimensi tersebut diperoleh, maka rumus selanjutnya menghitung hasil akhir indeks transparansi yaitu dengan menjumlahkan semua hasil dari 3 dimensi yang telah dihitung.

$$\text{ITRANZ} = (\text{I-TK01}) + (\text{I-TM02}) + (\text{I-TP03})$$

d. Kategori Penilaian Indeks Transparansi OPZ

Adapun kategori penilaian dalam mengukur tingkat transparansi organisasi pengelola zakat menggunakan indeks transparansi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kategori Penilaian Indeks Transparansi OPZ**

No.	Skor	Kriteria
1	0,00-0,25	Tidak Transparan
2	0,26-0,50	Kurang Transparan
3	0,51-0,75	Cukup Transparan
4	0,76-1,00	Transparan

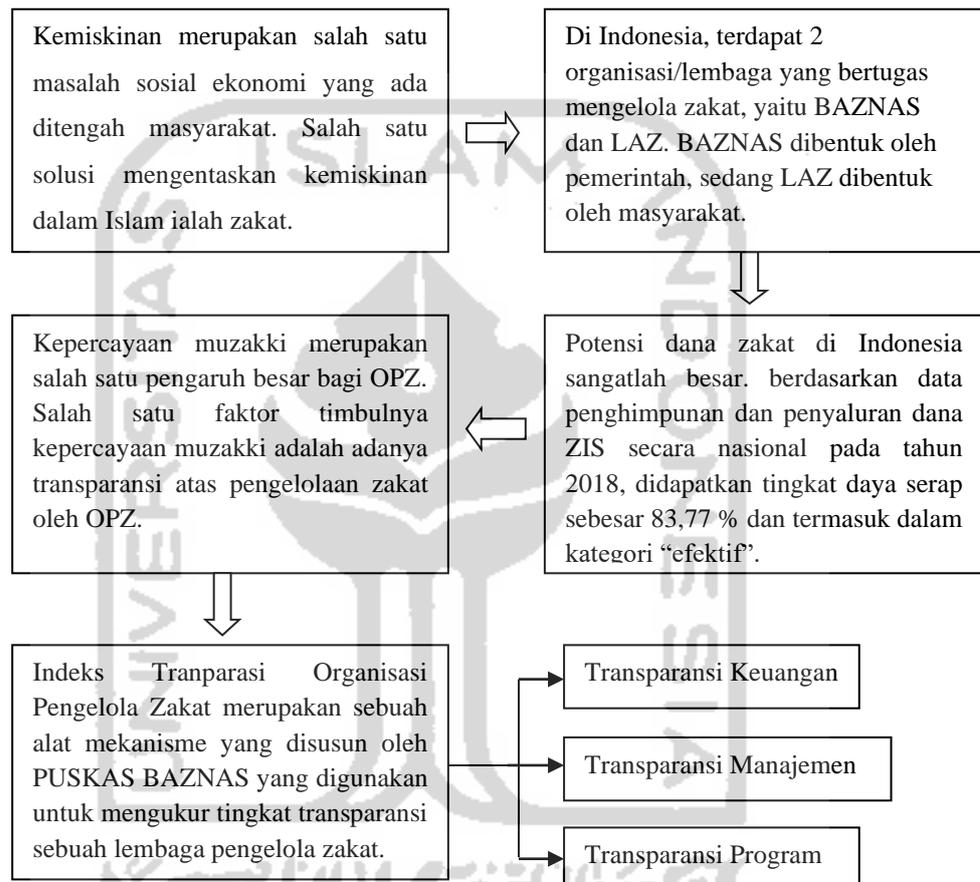
Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019)

Terdapat empat kategori penilaian kajian indeks transparansi OPZ dimana rentang nilai yang digunakan dalam kajian indeks transparansi OPZ secara umum berada pada angka 0,00-1,00 yang menunjukkan bahwa semakin mendekati nilai 1,00 maka semakin baik praktik transparansi pada lembaga zakat tersebut. Selanjutnya, apabila nilai hasil pengukuran indeks yang diperoleh berada pada angka 0,00-0,25 berarti termasuk dalam kategori tidak transparan. Sementara jika berada diangka 0,26-0,50 berarti termasuk dalam kategori kurang transparan. Selanjutnya, jika berada pada rentang nilai 0,51-0,75 tergolong kategori cukup transparan. Kemudian apabila dinilai sebuah OPZ termasuk dalam kategori transparan, maka rentang nilainya berada diantara 0,76-1,00 (BAZNAS, 2019).

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah model konseptual terkait bagaimana teori memiliki hubungan dengan berbagai faktor yang

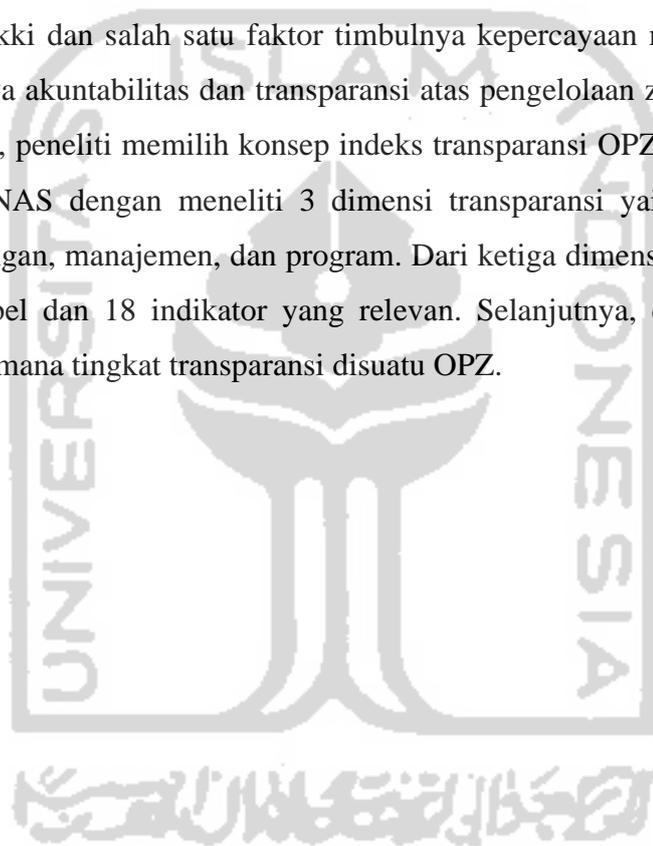
sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir ini menjadi sebuah pemahaman sebagai dasar atau pondasi bagi pemikiran selanjutnya serta merupakan suatu proses dari jalannya penelitian yang hendak dilakukan (Sugiyono, 2013). Berikut kerangka berfikir dari penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Jalannya penelitian diawali dari penyusunan latar belakang penelitian ini, yakni dimulai dari masalah sosial ekonomi dalam masyarakat yaitu kemiskinan. Dalam Islam setiap masalah yang dihadapi umat pasti ada solusinya, termasuk masalah bagaimana mengentaskan kemiskinan ini, yakni salah satunya dengan alokasi zakat. Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi 2 yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat guna membantu pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan dana zakat. Potensi zakat di Indonesia cukup besar, terbukti dari data statistik zakat pengumpulan dan penyaluran ZIS secara nasional tahun 2018 yang mencapai angka triliunan. Dari besarnya potensi zakat tersebut, tidak lepas dari kinerja dan performa OPZ serta kepercayaan muzakki. Oleh karena itu, para muzakki yang membayarkan zakatnya melalui OPZ harus sangat diperhatikan, sebab salah satu pengaruh besar bagi lembaga zakat adalah kepercayaan muzakki dan salah satu faktor timbulnya kepercayaan muzakki adalah adanya akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan zakat oleh OPZ. Maka, peneliti memilih konsep indeks transparansi OPZ oleh PUSKAS BAZNAS dengan meneliti 3 dimensi transparansi yaitu transparansi keuangan, manajemen, dan program. Dari ketiga dimensi itu, memuat 9 variabel dan 18 indikator yang relevan. Selanjutnya, dapat diketahui bagaimana tingkat transparansi disuatu OPZ.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain artinya merancang atau membuat sebuah perencanaan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa desain penelitian merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Subagiyo, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan *simple additive weighting*. Pada penelitian kuantitatif, terdapat 3 jenis desain penelitian, yakni penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian kausal. Jenis desain penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratoris dan deskriptif. Menurut Subagiyo (2017), penelitian eksploratoris merupakan penelitian yang berusaha untuk melakukan eksplorasi (penjelajahan/penyelidikan di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak tentang pengetahuan dan keadaan). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang menyajikan keadaan atau kondisi apa adanya serta tanpa rekayasa.

#### B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai lapangan penelitian adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta. BAZNAS Kabupaten Kulon Progo terletak di Jl. Moch Dawam, nomor 36 B, Driyan, Wates, Kabupaten Kulon Progo DIY. Sedangkan Dompot Dhuafa Yogyakarta berada di Jl. HOS Cokroaminoto nomor 146/1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Mei tahun 2020.

#### C. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah pegawai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Pada penelitian kuantitatif, definisi populasi yaitu wilayah generalisasi yang didalamnya terdapat obyek maupun subyek yang memiliki ciri khas dan kualitas kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Sementara menurut pendapat Gregory yang dikutip oleh (Satori & Komariah, 2010), populasi merupakan keseluruhan objek yang berhubungan dengan topik/masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh BAZNAS yang ada di DIY yang berjumlah 6 dan seluruh LAZ yang ada di DIY berjumlah 36 namun yang mengantongi izin pemerintah berjumlah 13 (Rusqiyati, 2019).

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang hendak diteliti dan dianggap mampu menggambarkan populasi itu sendiri (Soehartono, 2011). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan *convenience sampling*. Menurut Sekaran (2006), *convenience sampling* adalah prosedur memilih sampel dari anggota populasi yang mudah diperoleh serta mampu menyediakan informasi terkait masalah penelitian yang dilakukan. Maka dari itu siapa saja yang dapat memberikan informasi baik bertemu secara tidak sengaja atau kebetulan dengan peneliti, dapat dipilih sebagai sampel jika orang atau unit tersebut mampu memberikan informasi yang cocok sebagai sumber data. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel 1 BAZNAS dan 1 LAZ yang ada di Yogyakarta, yaitu BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta. Adapun responden penelitian pada BAZNAS Kulon Progo berjumlah 1 orang bernama Ira Rahmawati, staff bidang keuangan, perencanaan, dan pelaporan. Sedangkan responden DD Yogyakarta berjumlah 2 orang bernama Nanda dan

Meuthia Maharani, staff keuangan dan *human resources operational management*.

#### **E. Sumber Data**

Langkah awal dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data saat melakukan penelitian lapangan (Sugiyono, 2013). Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui pengisian kuisisioner indeks transparansi OPZ dan melalui wawancara.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan kuisisioner dan wawancara tidak terstruktur. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2010), metode kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan terkait suatu masalah atau bidang yang hendak diteliti. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya dengan kata lain wawancara ini hanya terkait garis-garis besar permasalahan. Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan ketika sudah mendapatkan jawaban kuisisioner dengan tujuan untuk memvalidasi data yang telah dijawab. Dalam penelitian ini, pegawai BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai responden/narasumber penelitian.

#### **G. Definisi Operasional Variabel**

Berikut ini tabel definisi operasional dari kesembilan variabel indeks transparansi OPZ:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Indeks Transparansi OPZ**

N o.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Publikasi Laporan Keuangan	Ikhtisar laporan keuangan OPZ yang wajib dipublikasikan baik itu melalui website maupun media massa	-Laporan website -Publikasi media massa
2	Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan OPZ pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja OPZ tersebut.	-Penggunaan SIMBA -Ketepatan waktu pelaporan -Opini auditor independen
3	Tata Kelola	Rangkaian proses, aturan, kebijakan, dan institusi yang berpengaruh terhadap pengarahannya, pengelolaan, dan juga pengontrolan suatu OPZ.	-Terdapat SOP dan standar ISO -Rencana strategis -Rencana kerja anggaran tahunan
4	<i>Company Profile</i> (profil perusahaan)	Sebuah laporan yang memberikan gambaran terkait sejarah, status saat ini, dan tujuan di masa depan sebuah perusahaan/lembaga.	Struktur organisasi: profil manajemen, member, dan sistem kepegawaian
5	Portal Informasi dan Dokumentasi (PID)	Portal <i>website</i> yang menyediakan informasi yang benar, akurat, mudah diakses dan <i>up-to-date</i> kepada publik.	Ketersediaan PID
6	Saluran Pengaduan	Penyediaan akses oleh OPZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.	Terdapat sistem saluran pengaduan
7	Aktivitas <i>Real-time</i>	Menginput dan memutakhirkan data penghimpunan dan penyaluran dana zakat ke sistem dengan waktu saat itu juga.	-Aktivitas penghimpunan ( <i>real-time</i> ) -Aktivitas penyaluran ( <i>real-time</i> )
8	<i>Database</i> Muzakki dan Mustahik	Kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah menggunakan program aplikasi untuk memperoleh informasi.	- <i>Database</i> muzakki individu - <i>Database</i> muzakki badan - <i>Database</i> mustahik
9	Data Program Penghimpunan dan Penyaluran	Terdapat data penghimpunan dan penyaluran menurut jenis dana (zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya)	-Data penghimpunan -Data penyaluran

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2019)

Dalam kuisisioner, penulis tidak menggunakan kalimat tanya, melainkan hanya menyebutkan nama per-indikator dan pilihan jawaban dalam bentuk pernyataan. Adapun lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

## H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kejadian maupun variabel penelitian baik alam ataupun sosial yang hendak diamati (Sugiyono, 2013). Adapun pengertian lainnya bahwa instrumen penelitian yaitu suatu alat yang berguna untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan (Sanjaya, 2011). Jadi, instrumen penelitian berfungsi sebagai sarana atau alat bantu dalam metode pengumpulan data yang diwujudkan dalam benda seperti angket/kuesioner, pedoman observasi, pedoman wawancara, skala, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang dijawab oleh responden terkait penelitian ini, yaitu pegawai BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Untuk mengukur nilai dari setiap indikator, peneliti menggunakan skala likert dengan rentang 1-5 yang menggambarkan bahwa 1 kondisi yang terburuk, dan 5 kondisi yang paling baik. Nilai dari setiap indikator berbeda-beda, adapun nilai dari setiap indikator terdapat pada lampiran ke-6. Berikut keterangan dari masing-masing rentang nilai:

Skor 1 = Sangat lemah

Skor 2 = Lemah

Skor 3 = Cukup

Skor 4 = Kuat

Skor 5 = Sangat kuat

## I. Teknik Analisis Data

### 1. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Jika data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian teknik selanjutnya yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik estimasi perhitungan yang bernama *Simple Additive Weighting*. Metode perhitungan ini mengacu pada Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yaitu metode pengambilan atribut ganda, dimana bobot setiap dimensi yang telah

ditentukan dikalikan dengan bobot setiap variabel, setelah itu dijumlahkan.

Berikut ini cara perhitungan ITRANZ menggunakan metode *Simple Additive Weighting*.

a. Menghitung Nilai Indikator

Untuk mengukur nilai dari setiap indikator, peneliti menggunakan skala likert dengan rentang 1-5. Jika hasilnya sudah diperoleh, maka nilai indikator tersebut dijumlahkan dan diambil rata2 untuk dijadikan nilai skala likert variabel.

b. Menghitung Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01)

$$(01) = D_1^1 (V_1^1 \times S + V_1^2 \times S) \dots \dots \dots (1)$$

$$I\text{-TK01} = \frac{(01)}{5} \dots \dots \dots (2)$$

c. Menghitung Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02)

$$(02) = D_2^2 (V_2^3 \times S + V_2^4 \times S + V_2^5 \times S + V_2^6 \times S) \dots \dots \dots (1)$$

$$I\text{-TM02} = \frac{(02)}{5} \dots \dots \dots (2)$$

d. Menghitung Indeks Transparansi Program (I-TP03)

$$(03) = D_3^3 (V_3^7 \times S + V_3^8 \times S + V_3^9 \times S) \dots \dots \dots (1)$$

$$I\text{-TP03} = \frac{(03)}{5} \dots \dots \dots (2)$$

e. Menghitung Nilai Indeks Transparansi OPZ (ITRANZ)

$$ITRANZ = (I\text{-TK01}) + (I\text{-TM02}) + (I\text{-TP03})$$

Catatan: Keterangan setiap simbol sudah dijelaskan pada landasan teori.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dalam bentuk naratif. Peneliti melakukan hal ini agar memudahkan penyajian data yang sudah diperoleh. Sehingga pengambilan kesimpulan akan lebih mudah serta sesuai dengan data-data dan informasi yang ada. Selain memudahkan peneliti, data yang disajikan dalam bentuk grafik dan dijelaskan secara naratif akan lebih mudah dipahami para pembaca.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kulon Progo**

##### **1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kulon Progo**

Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah. (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2016)

Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah menyetujui penggantian Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 Nopember 2011. Dalam UU ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta (2) meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS pusat sebagai koordinator seluruh OPZ baik pada BAZNAS Provinsi, Kabupaten/kota, maupun LAZ.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kulon Progo awalnya bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan BAZDA Kabupaten Kulon Progo masa bakti empat tahun dari 2009 hingga 2012. Penamaan BAZDA berubah menjadi BAZNAS setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. (BAZNAS Kulon Progo, 2017)

Berdasarkan SK Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II / 568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014, pembentukan BAZNAS Kabupaten ditetapkan sebagai organisasi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

## 2. Visi Misi BAZNAS Kulon Progo

### a. Visi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo yaitu (BAZNAS Kulon Progo, 2017):

“Menjadi pengelola zakat yang profesional, efektif, efisien, dan terpercaya di Kabupaten Kulon Progo”

### b. Misi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

Berikut adalah misi BAZNAS Kulon Progo :

- 1) Mengkoordinasikan LAZ dan UPZ tingkat Kabupaten Kulon Progo dalam mencapai target-target nasional
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
- 4) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Kulon Progo melalui sinergi ummat
- 5) Terlibat aktif dalam gerakan ZIS di Kabupaten Kulon Progo
- 6) Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kulon Progo

Berikut susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Kulon Progo :

- a. Pembina : Bupati Kabupaten Kulon Progo
- b. Penasehat : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
- c. Pimpinan BAZNAS Kulon Progo : Drs. H. Abdul Madjid
- d. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan/pengumpulan : H. Agus Nuryanto

- e. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & pendayagunaan : H. Bima Prasetya, SH, MM.
- f. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan : Sugiyatna, S.Pd.I
- g. Wakil Ketua IV Bidang SDM & Umum : Dra. Hj. RR. Widiastuti
- h. Staff Bidang Penghimpunan/Pengumpulan : Alex Kurniawan
- i. Staff Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan : Ira Rahmawati, S.Pd.I
- j. Staff Bidang SDM & Umum
  - 1) Edi Kurniawan, S.Th.I.
  - 2) Isrodin Musthofa
- k. Staff Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan : Muh. Abdul Jalil

## **B. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Yogyakarta**

### **1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Yogyakarta**

Dompot Dhuafa yaitu sebuah lembaga nirlaba atau organisasi non-profit yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia dengan berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) serta dana halal lainnya yang dihimpun dari perorangan/individu, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga. Munculnya lembaga DD (Dompot Dhuafa) ini berasal dari empati para wartawan / jurnalis Republika yang sering berinteraksi dengan masyarakat dhuafa dan juga masyarakat yang tergolong kaya. Para wartawan itu bernama Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. (Dompot Dhuafa Jogja, 2019)

Pada bulan April tahun 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Kridosono Yogyakarta. Acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Pada saat itu acara dihadiri oleh pemimpin umum Republika Parni Hadi, KH. Zainuddin MZ (alm), H. Roma Irama, dan awak pemasaran Republika.

Pada saat acara selesai, muncul perbincangan antara Pimpinan Republika Parni Hadi, KH. Zainuddin MZ (alm), dan anggota CDP (Corps Dakwah Pedesaan) yang meliputi guru, dai, dan aktivis sosial. Ketika Parni Hadi bertanya kepada anggota CDP berapa gaji/honor mereka per bulan, mereka menjawab “masing-masing Rp 6000.” Honor sebesar Rp 6000 itu didapatkan dari mahasiswa yang menyisihkan sebagian uang dari kiriman orang tua mereka. Hal itulah yang membuat Parni Hadi berinisiasi membantu anggota CDP dan KH. Zainuddin MZ (alm) juga akan membantu mencarikan”dana.

Dari adanya peristiwa itu, maka lahirlah Dompot Dhuafa Republika. Sebuah rubrik di halaman muka umum Koran Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka pada tanggal 2 Juli 1993. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa. Rubrik “Dompot Dhuafa” tersebut mengundang para pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli dhuafa yang diinisiasi oleh harian umum Republika. Rubrik tersebut mendapat sambutan”luar biasa dari masyarakat terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yayasan Dompot Dhuafa yang dikelola oleh Keluarga Peduli di Republika.

Pada tanggal 4 September 1994, yayasan Dompot Dhuafa pun didirikan. Sejak saat itu, Erie Sudewo yang merupakan salah satu pendiri Dompot Dhuafa ditunjuk mengawal yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZISWAF melalui beberapa program kemanusiaan seperti bantuan ekonomi, kebutuhan kedaruratan, kesehatan, dan pendidikan bagi kaum dhuafa. Profesionalitas DD pun kian terasah seiring meluasnya program kemanusiaan yang hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Program DD semakin berkembang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta bantuan bencana.

Dompot Dhuafa dikukuhkan pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) pada tanggal 10 Oktober 2001 oleh Departemen Agama RI. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, DD merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 diterbitkan oleh Menteri Agama RI tentang pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. (Dompot Dhuafa Jogja, 2019)

## 2. Visi Misi Dompot Dhuafa Yogyakarta

Visi dan Misi Dompot Dhuafa Yogyakarta mengacu pada Dompot Dhuafa pusat. Adapun visi Dompot Dhuafa adalah:

“Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang”berbasis pada sistem yang berkeadilan.”

Adapun misi Dompot Dhuafa yakni sebagai berikut (Dompot Dhuafa Jogja, 2019):

- a. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
- b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- d. Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

## 3. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta

Adapun daftar pengurus Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai berikut (Nizzah, 2020):

- a. Pimpinan cabang : Bambang Edi Prasetyo
- b. Manajer REMO : Zahron A.
  - 1) SPV *fundraising* : Rosalia
  - 2) SPV CRM : Anita Diah
  - 3) Staf Markom : Intan P.
  - 4) Staf fundraising : Nur Alam
  - 5) Staf CS : Nizzah F.
- c. Manajer *sosioenterprise* : Zahron A.
  - 1) SPV sosioenterprise : Satya Jati
  - 2) Staf sosioenterprise : Eko Susanto, Sulastomo N.
- d. SPV ekonomi : Nuryanto  
 Pendamping prog. Ekonomi : Nining S., Amma Heidi
- e. SPV pendidikan : Zakia Sekar
  - 1) Staf pendidikan : Nurul Azizah
  - 2) Pendamping prog. Pendidikan : Deta W., Ayu S.
- f. SPV kesehatan : Erica Yunita  
 Staf kesehatan : Febri K., Raditya W.
- g. SPV dakwah : Bilal Imam
- h. SPV socdev : Imam Hidayat
- i. SPV *human resources operational management* : Meuthia M.
  - 1) Staf keuangan : Nanda P.
  - 2) Staf GA : Yulius

### C. Analisis Hasil Pengukuran Indeks Transparansi OPZ

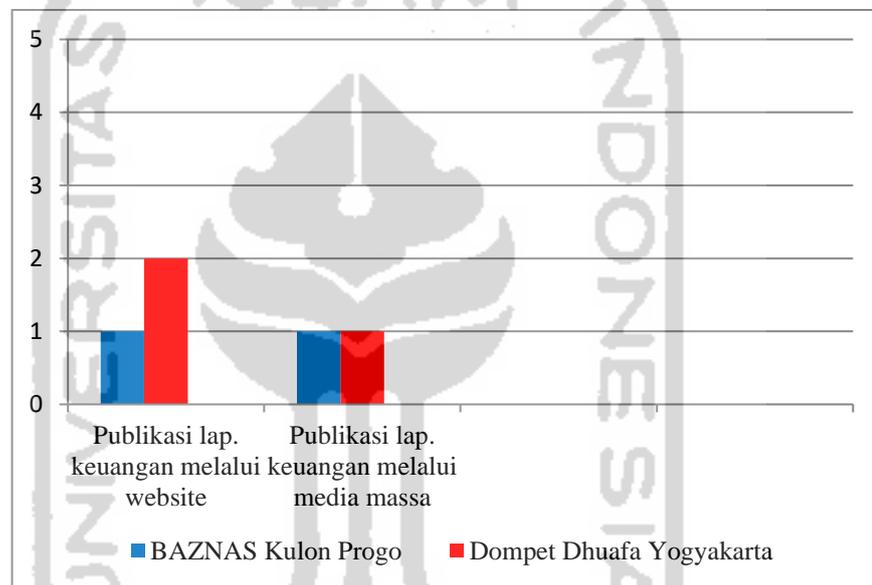
Berikut ini adalah hasil pengukuran nilai indeks transparansi OPZ dari BAZNAS Kulon progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Sumbu vertikal pada diagram ini adalah skala likert yang mana angka 5 mencerminkan kondisi paling baik disetiap indikatornya, dan angka 1 mencerminkan kondisi paling buruk. Sementara sumbu horizontalnya adalah indikator dari setiap variabel.

#### 1. Indeks Transparansi Keuangan

Pada dimensi transparansi keuangan, terdapat dua variabel yaitu (a) variabel publikasi laporan keuangan, dan (b) variabel laporan keuangan.

a. Publikasi Laporan Keuangan

Pada variabel publikasi laporan keuangan, terdapat dua indikator yaitu (a) publikasi laporan keuangan melalui website, dan (b) publikasi laporan keuangan melalui media massa. Nilai masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah (2020)

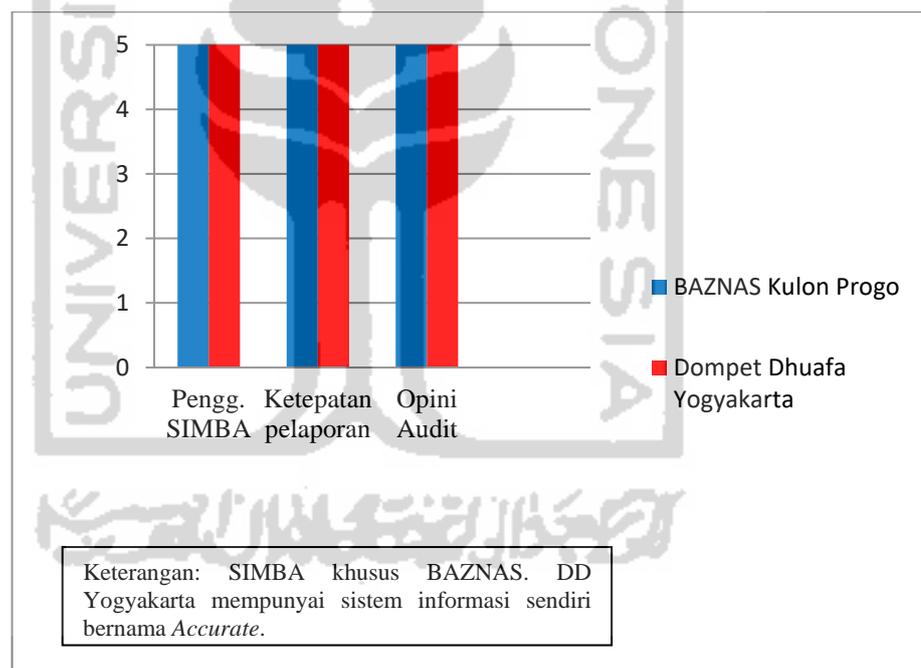
**Gambar 4.1 Nilai indikator pada variabel publikasi laporan keuangan**

Dari gambar 4.1, dapat dilihat bahwa baik pada indikator pertama atau indikator kedua, kedua OPZ masih jauh dari angka 5 yakni BAZNAS Kulon Progo pada setiap indikator masing-masing berada di angka 1 yang artinya tidak melakukan publikasi laporan keuangan baik melalui website maupun media massa atau media elektronik lainnya. Sedangkan untuk DD Yogyakarta, lebih baik dalam hal publikasi laporan keuangan melalui website yakni

berada di angka 2, yang artinya melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Namun pada indikator yang kedua, DD Yogyakarta berada di angka 1 yang berarti tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa ataupun media elektronik lainnya.

#### b. Laporan Keuangan

Pada variabel laporan keuangan, terdapat tiga indikator, yaitu (a) menggunakan SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS), (b) ketepatan waktu pelaporan, dan (c) opini auditor independen. Nilai masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah (2020)

#### Gambar 4.2 Nilai indikator pada variabel laporan keuangan

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada indikator pertama, kedua, dan ketiga, BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta masing-masing semuanya berada pada angka

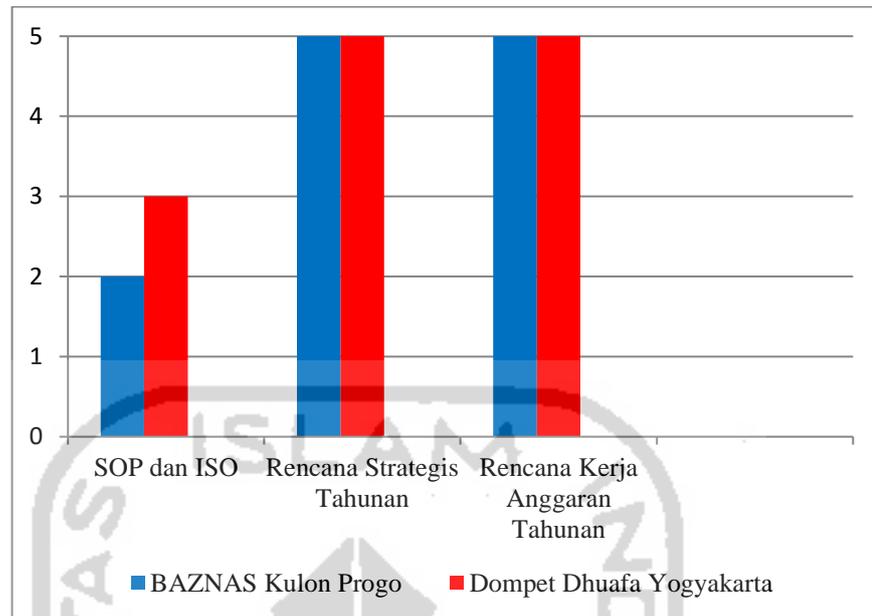
5. Skala/angka 5 pada indikator pertama artinya penyusunan laporan keuangan dari BAZNAS Kulon Progo telah menggunakan SIMBA atau terkoneksi dengan SIMBA, DD Yogyakarta juga menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi yang terkoneksi dengan Dompot Dhuafa pusat bernama sistem *Accurate*. Pada indikator kedua, nilai 5 menunjukkan bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta melakukan pelaporan keuangan tepat waktu pada BAZNAS pusat yakni setiap per-semester/6 bulan sekali. Sedangkan pada indikator yang ketiga, nilai 5 menunjukkan bahwa laporan keuangan dari BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta telah dilakukan opini auditor independen dengan jenis wajar..

## 2. Transparansi Manajemen

Pada dimensi transparansi manajemen, terdapat empat variabel yaitu (a) tata kelola, (b) *company profile*, (c) Portal Informasi dan Dokumentasi Publik, serta (d) saluran pengaduan.

### a. Tata Kelola

Pada variabel tata kelola, terdapat tiga indikator, yaitu (a) SOP dan ISO, (b) Rencana Strategis Tahunan, dan (c) Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nilai masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah (2020)

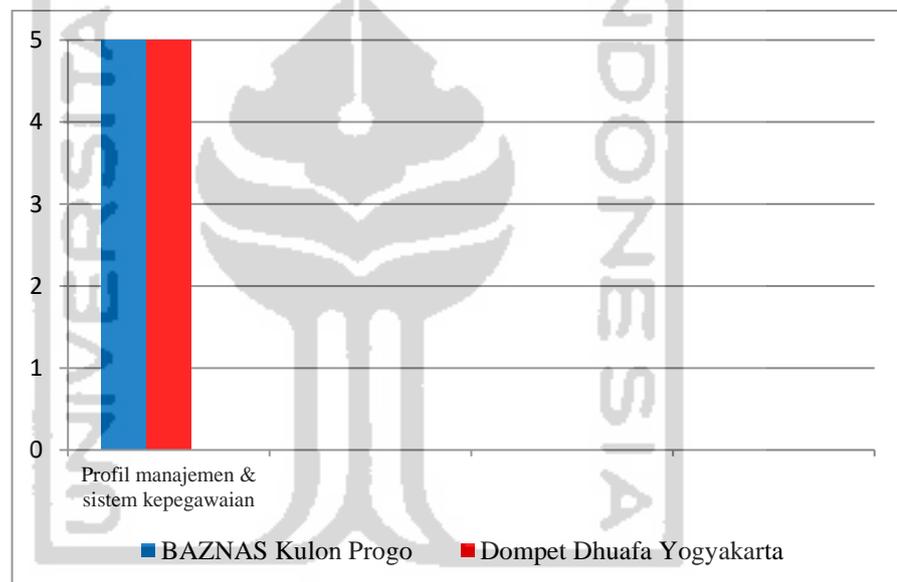
**Gambar 4.3 Nilai indikator pada variabel manajemen tata kelola**

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa BAZNAS Kulon Progo pada indikator pertama berada di angka 2, artinya memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) namun tidak berstandar ISO (*International Organization for Standardization*). Diharapkan lembaga zakat memberlakukan sedikitnya 4 sertifikasi ISO untuk menjaga tata kelola operasional yang terstandar. Pada indikator kedua berada di angka 5, artinya bahwa BAZNAS Kulon Progo memiliki rencana strategis dan dilaporkan ke BAZNAS pusat. Kemudian pada indikator ketiga berada di angka 5, yang berarti memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang diturunkan dari RENSTRA (Rencana Strategis) dan dilaporkan ke BAZNAS pusat. Sedangkan nilai indikator dari DD Yogyakarta yang pertama berada di angka 3, yang berarti memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 1 ISO. Pada indikator kedua berada di angka 5, artinya bahwa DD Yogyakarta memiliki rencana strategis

dan dilaporkan ke BAZNAS pusat. Kemudian indikator ketiga berada di angka 5, yang berarti memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS pusat.

b. *Company Profile*

Pada variabel struktur organisasi hanya terdapat satu indikator yang didalamnya tergabung seperti profil manajemen, profil member, dan sistem kepegawaian. Nilai indikator dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



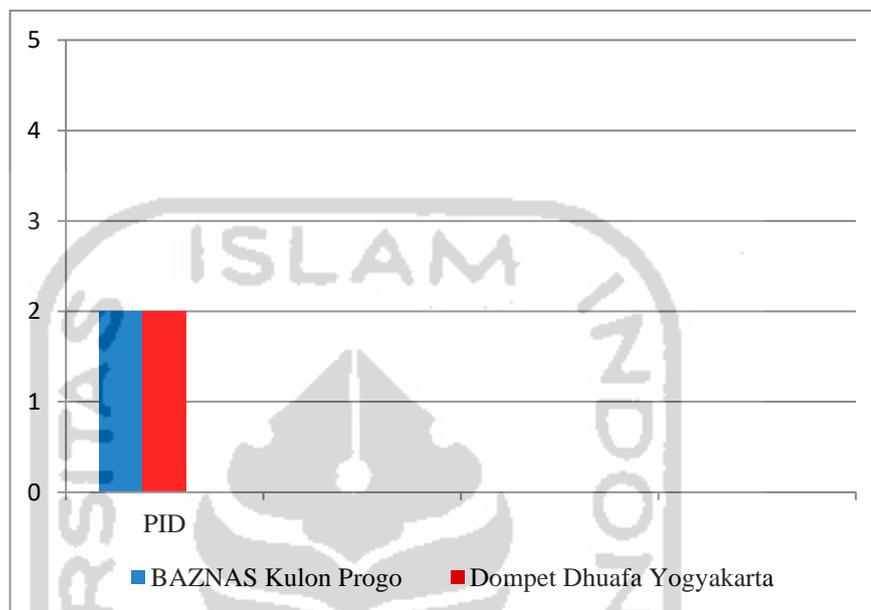
Sumber: Data primer diolah (2020)

**Gambar 4.4** Nilai indikator pada variabel *company profile*

Dari gambar 4.4, dapat dilihat bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta masing-masing berada di skala/angka nomor 5 yang berarti keduanya memiliki visi misi, struktur organisasi, profil anggota, dan sistem kepegawaian yang terdokumentasi.

c. Portal Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada variabel PID (Portal Informasi dan Dokumentasi Publik) hanya terdapat satu indikator yakni PID itu sendiri. Nilai indikator PID dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



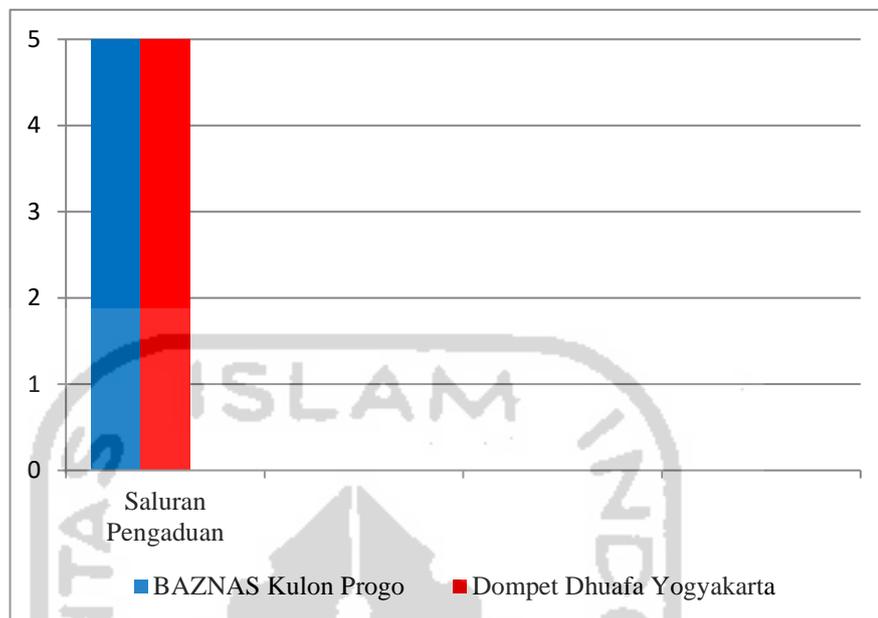
Sumber: Data primer diolah (2020)

#### Gambar 4.5 Nilai indikator pada variabel PID

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sama-sama berada di angka 2, artinya bahwa baik BAZNAS Kulon Progo ataupun DD Yogyakarta keduanya tidak memiliki pejabat PID namun memiliki portal informasi dan dokumentasi publik. Diantara keduanya belum memiliki pejabat PID yang ber-SK dari BAZNAS pusat, namun BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memiliki staf yang bertugas untuk mengelola informasi dan dokumentasi publik.

#### d. Saluran Pengaduan

Pada variabel saluran pengaduan juga hanya terdapat satu indikator, yaitu saluran pengaduan itu sendiri. Nilai indikator saluran pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer diolah (2020)

#### **Gambar 4.6 Nilai indikator pada variabel saluran pengaduan**

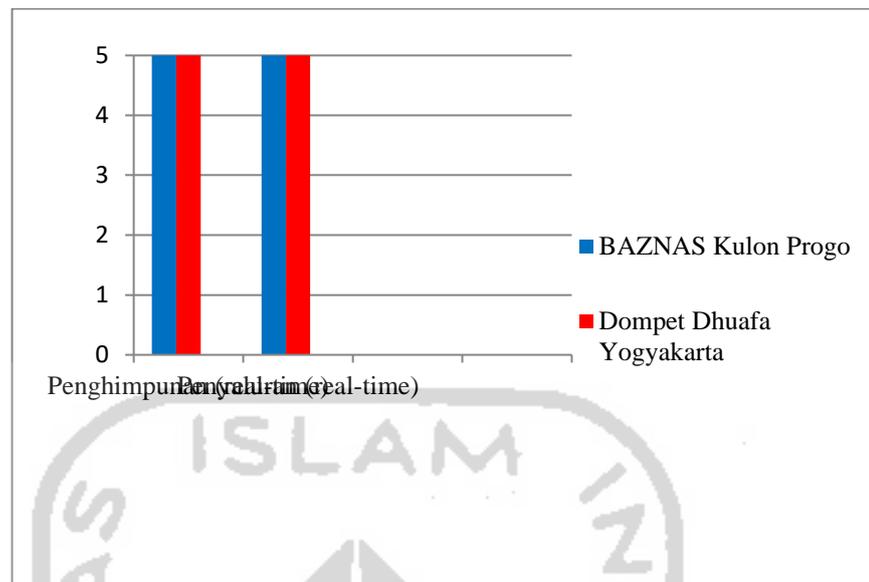
Dari gambar 4.6 dapat dilihat bahwa nilai indikator dari BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sama-sama berada di angka 5, yang artinya bahwa keduanya memiliki saluran pengaduan yang diumumkan ke publik dengan bentuk informasi kontak yang terdapat pada *website* masing-masing.

### 3. Transparansi Program

Pada dimensi transparansi program terdapat tiga variabel, antara lain : (a) aktivitas *real-time*, (b) database muzaki dan mustahik, dan (c) data penghimpunan dan penyaluran.

#### a. Aktivitas *Real-time*

Pada variabel aktivitas *real-time* terdapat 2 indikator diantaranya: (a) aktivitas penghimpunan *real-time*, dan (b) aktivitas penyaluran *real-time*. Nilai dari kedua indikator aktivitas *real-time* dapat dilihat pada gambar berikut:



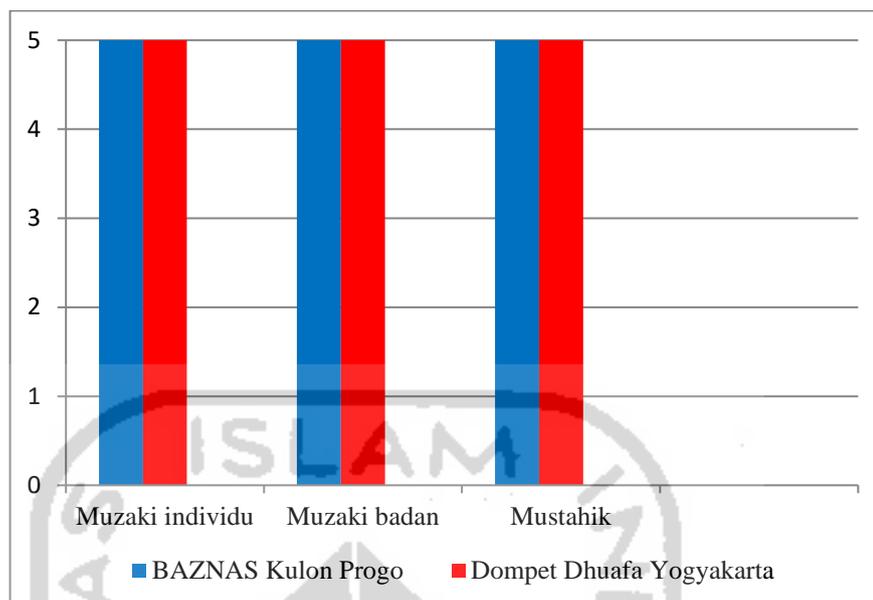
Sumber: Data primer diolah (2020)

#### Gambar 4.7 Nilai indikator pada variabel aktivitas *real-time*

Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa pada masing-masing indikator baik indikator pertama atau kedua, BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sama-sama berada di angka 5 yang artinya bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memutakhirkan data penghimpunan secara *real-time* serta memutakhirkan data penyaluran secara *real-time*.

#### b. Database Muzaki dan Mustahik

Pada variabel database muzaki dan mustahik terdapat tiga indikator, antara lain: (a) muzaki individu, (b) muzaki badan, dan (c) mustahik. Nilai dari ketiga indikator aktivitas *real-time* dapat dilihat pada gambar berikut:



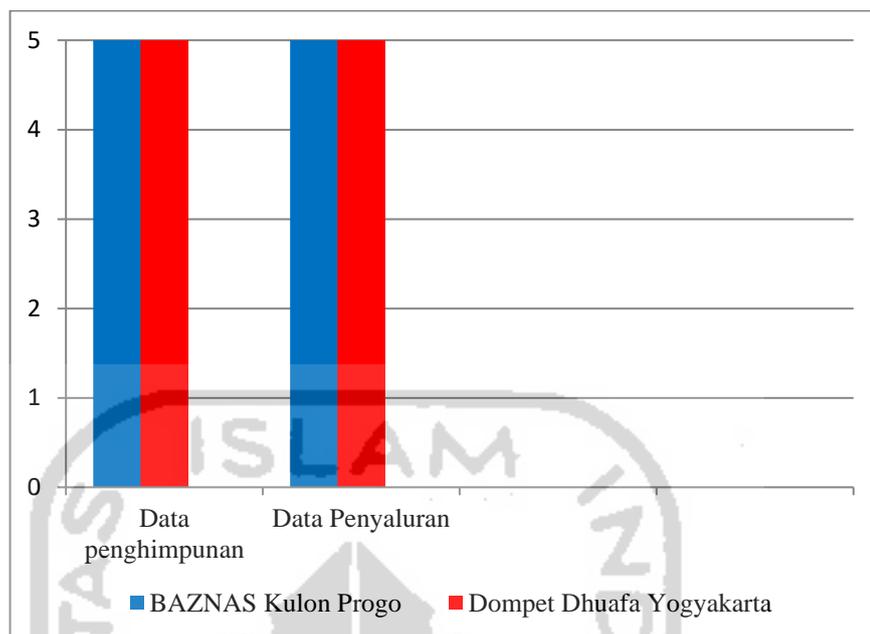
Sumber: Data primer diolah (2020)

#### Gambar 4.8 Nilai indikator pada variabel *database muzaki dan mustahik*

Dari gambar 4.8 dapat dilihat bahwa nilai ketiga indikator dari BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta berada di angka 5, yang artinya pada indikator pertama, BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memiliki database muzaki individu dan dimutakhirkan (di *update* setiap bulan). Indikator kedua artinya bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memiliki database muzaki badan dan dimutakhirkan, serta indikator yang ketiga berarti BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta memiliki database mustahik dan dimutakhirkan.

#### c. Data Program Penghimpunan dan Penyaluran

Pada variabel data penghimpunan dan penyaluran terdapat 2 indikator, yakni (a) data penghimpunan, dan (b) data penyaluran. Nilai dari kedua indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



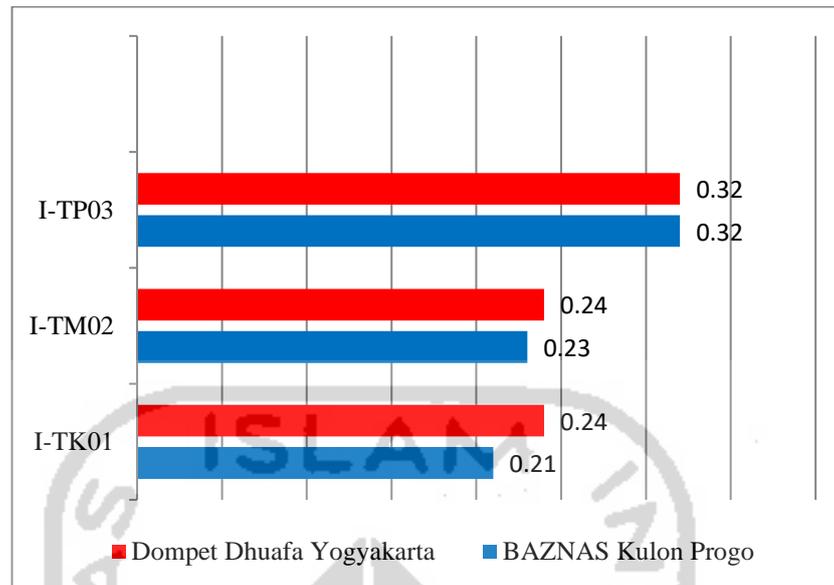
Sumber: Data primer diolah (2020)

#### **Gambar 4.9 Nilai indikator pada variabel data program penghimpunan dan data penyaluran**

Dari gambar 4.9 dapat dilihat bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta masing-masing memiliki nilai 5 baik dari indikator pertama maupun kedua. Nilai 5 pada indikator pertama berarti OPZ memiliki data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana serta *diupdate*. Sedangkan nilai 5 pada indikator kedua artinya OPZ memiliki data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana dan juga *diupdate*.

#### **D. Perhitungan Nilai Indeks Transparansi OPZ**

Berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai indeks transparansi OPZ dari BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta menggunakan rumus ITRANZ:



Sumber: Data primer diolah (2020)

**Gambar 4.10 Hasil perhitungan nilai Itrans**

1. Nilai Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01)

a. BAZNAS Kulon Progo

$$\begin{aligned}
 (01) &= D_1^1 (V_1^1 \times S + V_1^2 \times S) \\
 &= 0,39 (0,55 \times 1 + 0,45 \times 5) \\
 &= 0,39 (2,8) \\
 &= 1,09
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I-TK01 &= \frac{(01)}{5} \\
 &= \frac{1,09}{5}
 \end{aligned}$$

$$= 0,21$$

b. Dompet Dhuafa Yogyakarta

$$\begin{aligned}
 (01) &= D_1^1 (V_1^1 \times S + V_1^2 \times S) \\
 &= 0,39 (0,55 \times 1,5 + 0,45 \times 5) \\
 &= 0,39 (3,08) \\
 &= 1,2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{I-TK01} &= \frac{(01)}{5} \\
 &= \frac{1,2}{5} \\
 &= 0,24
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan menggunakan rumus ITRANZ diatas, indeks transparansi keuangan dari BAZNAS Kabupaten Kulon Progo menghasilkan nilai 0,21. Sementara untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta, didapatkan nilai indeks transparansi keuangan sebesar 0,24. Pada indeks transparansi keuangan ini nilai Dompot Dhuafa Yogyakarta lebih tinggi sebab DD Yogyakarta mendapatkan rata-rata nilai skala likert yang lebih tinggi pada variabel pertama dan kedua.

2. Nilai Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02)

a. BAZNAS Kulon Progo

$$\begin{aligned}
 (02) &= D_2^2 (V_2^3 \times S + V_2^4 \times S + V_2^5 \times S + V_2^6 \times S) \\
 &= 0,29 (0,32 \times 4 + 0,23 \times 5 + 0,21 \times 2 + 0,24 \times 5) \\
 &= 0,29 (4,05) \\
 &= 1,17
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{I-TM02} &= \frac{(02)}{5} \\
 &= \frac{1,17}{5}
 \end{aligned}$$

$$= 0,23$$

b. Dompot Dhuafa Yogyakarta

$$\begin{aligned}
 (02) &= D_2^2 (V_2^3 \times S + V_2^4 \times S + V_2^5 \times S + V_2^6 \times S) \\
 &= 0,29 (0,32 \times 4,3 + 0,23 \times 5 + 0,21 \times 2 + 0,24 \times 5) \\
 &= 0,29 (4,15) \\
 &= 1,20
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I\text{-TM02} &= \frac{(02)}{5} \\
 &= \frac{1,20}{5} \\
 &= 0,24
 \end{aligned}$$

Pada perhitungan indeks transparansi manajemen (ITM) diatas menggunakan rumus ITRANZ, BAZNAS Kabupaten Kulon Progo mendapatkan nilai ITM sebesar 0,23. Sedangkan Dompot Dhuafa Yogyakarta mendapatkan nilai ITM sebesar 0,24. BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki rata-rata nilai skala likert yang sama pada tiga variabel indeks transparansi manajemen ini.

### 3. Nilai Indeks Transparansi Program (I-TP03)

#### a. BAZNAS Kulon Progo

$$\begin{aligned}
 (03) &= D_3^3 (V_3^7 \times S + V_3^8 \times S + V_3^9 \times S) \\
 &= 0,32 (0,52 \times 5 + 0,23 \times 5 + 0,25 \times 5) \\
 &= 0,32 (5) \\
 &= 1,6 \\
 I\text{-TP03} &= \frac{(03)}{5} \\
 &= \frac{1,6}{5} \\
 &= 0,32
 \end{aligned}$$

#### b. Dompot Dhuafa Yogyakarta

$$\begin{aligned}
 (03) &= D_3^3 (V_3^7 \times S + V_3^8 \times S + V_3^9 \times S) \\
 &= 0,32 (0,52 \times 5 + 0,23 \times 5 + 0,25 \times 5) \\
 &= 0,32 (5) \\
 &= 1,6 \\
 I\text{-TP03} &= \frac{(03)}{5}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1,6}{5}$$

$$= 0,32$$

Pada perhitungan nilai indeks transparansi program (I-TP03) menggunakan rumus ITRANZ di atas, BAZNAS Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai I-TP03 sebesar 0,32. Demikian sama halnya dengan DD Yogyakarta yang juga memperoleh nilai I-TP03 sebesar 0,32.

Setelah diperoleh nilai indeks transparansi keuangan, transparansi program, dan transparansi manajemen maka selanjutnya menghitung nilai akhir yakni dengan menjumlahkan semua hasil/nilai yang telah diperoleh tersebut dari masing-masing OPZ.

Pertama, nilai akhir indeks transparansi OPZ dari BAZNAS Kabupaten Kulon Progo dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ITRANZ} &= (\text{I-TK01}) + (\text{I-TM02}) + (\text{I-TP03}) \\ &= 0,21 + 0,23 + 0,32 \\ &= 0,76 \end{aligned}$$

Setelah nilai I-TK01, I-TM02, dan I-TP03 dijumlahkan, BAZNAS Kabupaten Kulon Progo mendapatkan nilai sebesar 0,76. Berdasarkan kategori penilaian ITRANZ, nilai 0,76 termasuk dalam kriteria “Transparan”, karena angka tersebut termasuk dalam rentang nilai 0,76 - 1,00.

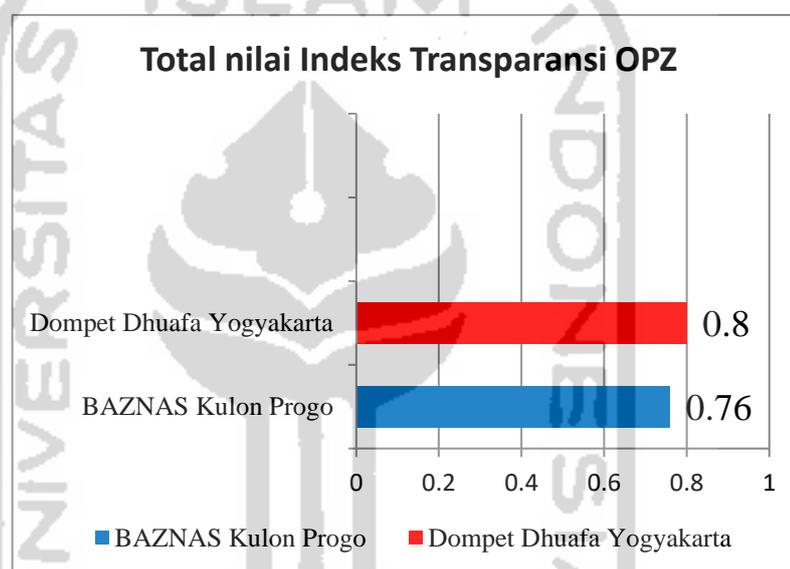
Kedua, nilai indeks transparansi OPZ dari Dompot Dhuafa Yogyakarta dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{ITRANZ} = (\text{I-TK01}) + (\text{I-TM02}) + (\text{I-TP03})$$

$$= 0,24 + 0,24 + 0,32$$

$$= 0,8$$

Setelah dijumlahkan hasil dari nilai I-TK01, I-TM02, dan I-TP03, Dompot Dhuafa Yogyakarta mendapatkan nilai indeks transparansi OPZ sebesar 0,8. Berdasarkan kategori penilaian ITRANZ, nilai 0,8 termasuk dalam kriteria “Transparan” sebab masuk dalam rentang nilai 0,51 - 0,75.



Sumber: Data primer diolah (2020)

**Gambar 4.11 Total Nilai Indeks Transparansi OPZ**

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti memaparkan atau menjelaskan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan yakni tentang penilaian transparansi menggunakan indeks transparansi OPZ di BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Berikut pembahasannya:

### 1. Implementasi Transparansi Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01)

Pada indeks transparansi keuangan, terdapat dua variabel dengan lima indikator. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus ITRANZ, BAZNAS Kulon Progo memperoleh nilai I-TK01 sebesar 0,21.

Sedangkan nilai ITK-01 dari Dompot Dhuafa Yogyakarta sebesar 0,24. Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki nilai I-TK01 lebih tinggi dari BAZNAS Kulon Progo dengan selisih sebesar 0,03. DD Yogyakarta lebih unggul nilainya pada indikator publikasi laporan keuangan melalui website.

Pada variabel publikasi laporan keuangan, DD Yogyakarta dinilai lebih transparan sebab melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Sedangkan BAZNAS Kulon Progo tidak mempublikasi laporan keuangannya, sementara masih dalam bentuk cetak dengan alasan karena website BAZNAS Kulon Progo baru dalam masa pembenahan dan belum sempurna. Sementara untuk publikasi laporan keuangan melalui media massa/media elektronik lainnya, baik BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta tidak melakukan publikasi laporan keuangan.

Pada variabel laporan keuangan, BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta dinilai sama-sama transparan pada kondisi paling baik pada ketiga indikatornya. Pertama, indikator penggunaan sistem SIMBA (khusus BAZNAS), dan DD Yogyakarta menggunakan sistem *Accurate* sebagai sistem laporan keuangan. SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS) adalah sebuah sistem /aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional dan terkoneksi dengan BAZNAS pusat. Aplikasi yang berbasis web ini merupakan sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan maupun lembaga zakat di Indonesia tanpa harus melakukan proses instalasi yang rumit. Adapun untuk DD Yogyakarta memiliki sistem informasi sendiri yakni bernama *Accurate* dan juga terkoneksi dengan Dompot Dhuafa pusat. *Accurate* merupakan sebuah software akuntansi produk lokal yang melayani berbagai jenis pembukuan perusahaan di Indonesia dan sudah mengikuti PSAK perpajakan di Indonesia. Kedua, indikator ketepatan waktu pelaporan. Keduanya

dinilai transparan sebab telah melaporkan laporan keuangan kepada BAZNAS Pusat dengan tepat waktu yakni setiap per-semester/6 bulan sekali. Ketiga, indikator opini auditor independen. Keduanya dinilai sama-sama transparan karena termasuk dalam jenis opini audit wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian merupakan suatu pendapat yang diberikan ketika sudah dilaksanakannya audit sesuai SPAP (Standar Auditing), auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan dalam laporan keuangan serta tidak menemukan adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia.

Dalam pengukuran menggunakan skala likert, angka 5 dalam penelitian ini memiliki arti “sangat kuat/paling baik” tingkat transparansinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS/LAZ telah mengimplementasikan indeks transparansi OPZ secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sudah mengimplementasikan indikator penggunaan SIMBA, ketepatan waktu pelaporan, serta opini auditor independen.

## 2. Implementasi Transparansi Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02)

Pada indeks transparansi manajemen, terdapat empat variabel dengan enam indikator. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan menggunakan rumus ITRANZ, maka diperoleh nilai 0,23 untuk BAZNAS Kulon Progo dan 0,24 untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dari enam indikator, hanya satu indikator yang nilainya berbeda yaitu indikator SOP dan ISO.

Adapun pada indikator SOP (Standar Operasional Prosedur) dan ISO (*International Organization for Standardization*), DD Yogyakarta dinilai lebih transparan sebab memiliki SOP yang di standardisasikan melalui 1 ISO. DD Yogyakarta menggunakan jenis ISO 9001:2015, yaitu suatu standar internasional sertifikasi sistem manajemen mutu

atau sertifikasi sistem manajemen kualitas. Sementara SOP yang dimiliki BAZNAS belum berstandar ISO.

Selanjutnya lima indikator yang bernilai sama yaitu indikator Rencana Strategis Tahunan (RENSTRA), indikator Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam variabel tata kelola, indikator profil manajemen & sistem kepegawaian dalam variabel *company profile*, indikator portal informasi dan dokumentasi publik (PID) dalam variabel PID, serta indikator saluran pengaduan dalam variabel saluran pengaduan. Pertama, indikator RENSTRA. Keduanya termasuk dalam kriteria transparansi kuat sebab memiliki rencana strategis tahunan yang dilaporkan ke BAZNAS Pusat. Kedua, indikator RKAT. Keduanya termasuk dalam kriteria transparansi kuat sebab memiliki RKAT yang diturunkan dari RENSTRA serta dilaporkan ke BAZNAS pusat. BAZNAS Kulon Progo menggunakan fiktur RKAT pada aplikasi SIMBA, sementara RKAT dari DD Yogyakarta terintegrasi dengan Dompot Dhuafa pusat. Ketiga, variabel *company profile*. Keduanya termasuk dalam kriteria transparansi kuat, sebab memiliki visi misi, struktur organisasi, profil anggota, serta sistem kepegawaian yang terdokumentasi. Keempat, variabel PID. Keduanya termasuk dalam kriteria transparansi lemah, sebab tidak memiliki pejabat PID namun memiliki portal informasi dan dokumentasi publik. Pejabat pengelola PID yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat terdiri atas penasehat, penanggung jawab, kepala PID, koordinator PID, serta pelaksana PID. Baik BAZNAS Kulon Progo maupun DD Yogyakarta keduanya belum memiliki pejabat PID secara ber-SK, namun mereka memiliki staf yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab perihal publikasi informasi dan dokumentasi publik, seperti pada BAZNAS Kulon Progo dikelola oleh staf bagian SDM dan umum, sedangkan di DD Yogyakarta dikelola oleh staf marketing/REMO. Kelima, variabel saluran pengaduan. BAZNAS pusat sendiri memiliki saluran pengaduan dengan menggunakan “*Whistleblowing System*”.

Sedangkan BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta belum memiliki sistem khusus untuk saluran pengaduan, akan tetapi mereka menyediakan saluran pengaduan yang diunggah ke website berupa informasi kontak seperti nomor telepon, e-mail, serta menyediakan formulir pengaduan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa I-TM02 yang sudah di implementasikan maksimal oleh BAZNAS Kulon Progo dan Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah variabel *company profile*, saluran pengaduan, serta indikator RENSTRA dan RKAT.

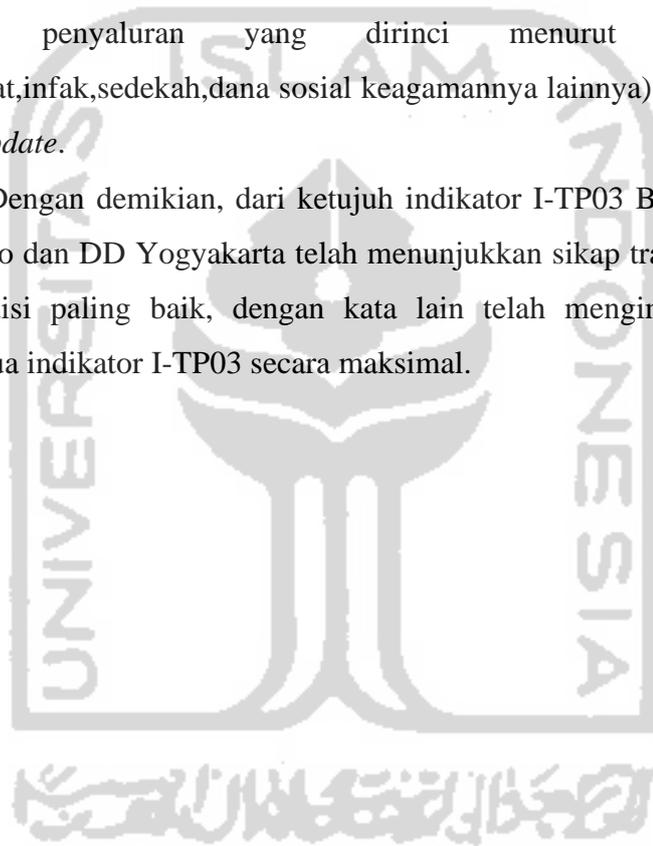
### 3. Implementasi Transparansi Indeks Transparansi Program

Pada indeks transparansi program (I-TP03) terdapat tiga variabel dengan tujuh indikator. Berdasarkan hasil penelitian dan telah dihitung menggunakan rumus ITRANZ, maka diperoleh nilai I-TP03 dari BAZNAS Kulon Progo sebesar 0,32. Sementara nilai I-TP03 yang diperoleh Dompot Dhuafa Yogyakarta juga sama yakni sebesar 0,32.

BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta dinilai transparan dalam I-TP03 pada variabel aktivitas penyaluran (*real-time*) dan penghimpunan (*real-time*) sebab keduanya memutakhirkan data penghimpunan dan data penyaluran secara *real-time*. Laporan *real-time*/waktu-nyata adalah laporan mengenai aktivitas di situs web yang dapat diberikan secara waktu nyata, tanpa adanya penundaan waktu yang signifikan. Apabila OPZ menggunakan aplikasi SIMBA, maka data penghimpunan dan penyaluran dapat dilaporkan secara *real-time* menggunakan aplikasi SIMBA tersebut. Sementara DD Yogyakarta memutakhirkan aktivitas penghimpunan dan penyaluran secara *real-time* yang terkoneksi dengan Dompot Dhuafa pusat. Adapun pada indikator database muzaki individu/perorangan, *database* muzaki badan, dan *database* mustahik. *Database* disini merupakan kumpulan data muzaki baik individu maupun badan/kelompok, dan juga mustahik yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat

diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (*software*) program maupun aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pada variabel ini, BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sudah memiliki database muzaki individu, muzaki badan, serta mustahik yang mana ketiga databasenya selalu *diupdate*. Kemudian pada variabel data program penghimpunan dan penyaluran. BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta masing-masing memiliki data program penghimpunan dan penyaluran yang dirinci menurut jenis dana (zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya) dan juga selalu *diupdate*.

Dengan demikian, dari ketujuh indikator I-TP03 BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta telah menunjukkan sikap transparansi pada kondisi paling baik, dengan kata lain telah mengimplementasikan semua indikator I-TP03 secara maksimal.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Indeks Transparansi OPZ, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Untuk BAZNAS Kulon Progo, diperoleh nilai Indeks Transparansi Keuangan (I-TK01) sebesar 0,21. Pada I-TK01 ini BAZNAS Kulon Progo telah mewujudkan bentuk transparansi pengelolaan zakat dengan kondisi yang paling baik pada indikator penggunaan SIMBA, ketepatan waktu pelaporan, dan opini auditor independen. Kemudian pada Indeks Transparansi Manajemen (I-TM02) diperoleh nilai sebesar 0,23. BAZNAS Kulon Progo telah mengimplementasikan transparansi I-TM02 pada kondisi paling baik pada indikator RENSTRA, RKAT, *company profile*, serta saluran pengaduan. Selanjutnya pada Indeks Transparansi Program (I-TP03) diperoleh nilai sebesar 0,32. Adapun pada I-TP03 ini BAZNAS Kulon Progo telah mengimplementasikan transparansi pada kondisi paling baik pada semua indikatornya yang berjumlah tujuh indikator.

Untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta, diperoleh nilai I-TK01 sebesar 0,24. Pada dimensi I-TK01 ini DD Yogyakarta telah mencerminkan kondisi transparansi paling baik pada indikator penggunaan sistem laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan dan opini auditor independen. Kemudian pada dimensi I-TM02, DD Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 0,24. Dimana pada I-TM02 ini DD Yogyakarta sudah mencerminkan bentuk transparansi dengan kondisi paling baik pada indikator RENSTRA, RKAT, *company profile*, dan saluran pengaduan. Selanjutnya pada dimensi I-TP03 DD Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 0,32 dimana DD Yogyakarta telah mengimplementasikan transparansi pada kondisi paling baik pada semua indikatornya.

Adapun nilai total perhitungan dari indeks transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program tersebut yang menentukan bagaimana tingkat transparansi disuatu OPZ berdasarkan pedoman indeks transparansi OPZ. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungannya, BAZNAS Kulon Progo memperoleh nilai ITRANZ sebesar 0,76. Berdasarkan kategori penilaian ITRANZ, nilai 0,76 termasuk dalam kriteria “Transparan”, karena angka tersebut termasuk dalam rentang nilai 0,76 - 1,00. Sedangkan Dompot Dhuafa Yogyakarta memperoleh nilai total ITRANZ sebesar 0,8. Nilai tersebut juga termasuk dalam kriteria “Transparan” berdasarkan kategori penilaian ITRANZ, sebab masuk dalam rentang nilai 0,76 – 1,00.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian indeks transparansi OPZ yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pada dimensi transparansi keuangan khususnya pada variabel laporan keuangan, BAZNAS Kulon Progo dan DD Yogyakarta sebaiknya lebih rutin melakukan publikasi laporan keuangan terutama melalui website agar lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.
2. Pada dimensi transparansi manajemen terutama pada variabel SOP dan ISO, BAZNAS Kulon Progo sebaiknya dapat bersertifikasi ISO sebagai upaya OPZ dalam menjaga tata kelola operasional yang terstandar. Kemudian pada variabel PID, baik BAZNAS Kulon Progo maupun DD Yogyakarta mungkin perlu menetapkan pejabat PID sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua BAZNAS No. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Saran untuk PUSKAS BAZNAS agar lebih melengkapi materi/penjelasan Indeks Transparansi OPZ ini khususnya pada bagian indikator variabel serta rumusnya agar lebih dapat dipahami oleh pembaca maupun peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2016). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Retrieved Februari 12, 2020, from [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Binjai. *At-Tawassuth, Vol. 3, No. 3*.
- Bahammam, F. S. (2015). *Panduan Praktis Muslim*. Bekasi: Indo Modern Guide.
- BAZNAS. (2019). *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2016). *Sejarah BAZNAS*. Retrieved Mei 19, 2020, from BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA: <https://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1>
- BAZNAS Kulon Progo. (2017). *Sejarah*. Retrieved Mei 19, 2020, from BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KULON PROGO: <https://www.baznas.kulonprogokab.go.id/pages-81-sejarah.html>
- BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Budi, S., Widodo, S., & Enita. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada LAZ Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information Systems, Vol. 1, No. 2 ISSN: 2685-2543*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Dompot Dhuafa Jogja. (2019). *Sejarah*. Retrieved Mei 12, 2020, from Dompot Dhuafa Yogyakarta: <https://jogja.dompetdhuafa.org/sejarah/>
- Dumont, G. E. (2013). Nonprofit Virtual Accountability: An Index and Its Application. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 42 (5)*, 1049-1067.
- Dzajuli, Y. J. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 4, No. 1 ISSN 2089-3310 .
- Fatmawati, Nurkhasanah, N., & Nurdin. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat . *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* , Universitas Islam Bandung.
- Fernando. (2018). *Importance of Financial Reporting for Transparency*. Daily FT.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- KBBI. (2020). *Arti kata akuntabilitas*. Retrieved Februari 8, 2020, from [kbbi.kamus.pelajar.id](http://kbbi.kamus.pelajar.id)
- Kemenag RI. (2013). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada LAZ di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3 , 550-561.
- Nizzah. (2020, Mei 10). Struktur Organisasi DD Jogja. (A. Maulina, Interviewer)
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat Press.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *MIMBAR HUKUM*, Volume 27, Nomor 1 , 69.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas OPZ. *Jurnal Muqtasid*, Vol 6, No. 1 .
- Rahmat, R., Atmaja, A. T., & Sulindawati, N. L. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (Studi Kasus pada

BAZNAS Kabupaten Buleleng). *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.7, No.1* .

Rusqiyati, E. A. (2019, September 20). *Baru Sekitar 40 Persen LAZ di DIY Kantongi Izin*. Retrieved Maret 26, 2020, from jogja.antaranews.com: <https://jogja.antaranews.com/berita/395010/baru-sekitar-40-persen-laz-di-diy-kantongi-izin>

Sanjaya. (2011). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Satori, D., & Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Saxton, G. D., & Guo, C. (2011). Accountability Online: Understanding the Web-based Accountability Practices of Nonprofit Organizations. *Nirlaba and Voluntary Sector Quarterly, Vol 40 (2)* , 270-295.

Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sholahuddin. (2006). *Ekonomi Islam, Cet. I*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Soehartono, I. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subagiyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam; Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tapanjeh, A. M. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles, Critical Perspective on Accounting*.

Umar, H. (2000). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: JBRC.

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2* , 205-218.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. BAZNAS Kabupaten Sleman dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta

Bersama dengan ini, saya:

Nama : Arum Maulina

Program Studi : Ekonomi Islam

Instansi : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Mohon izin kepada pihak BAZNAS Sleman dan Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk membantu berpartisipasi dalam penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir/ skripsi saya yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Zakat dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sleman dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta)".

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan pihak BAZNAS Kabupaten Sleman dan LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk mengisi kuesioner ini. Semua informasi yang diterima hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Saya mengucapkan terimakasih atas kerjasama serta kesediaannya dalam pengisian kuesioner ini. Jazakumullah Khairan Katsiran. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakuh.

\* Wajib

Instansi \*

BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

[LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta](#)

Nama \*

Nanda & Meuthia Maharani

Bidang / divisi \*

keuangan

## Transparansi Keuangan

Pada dimensi transparansi keuangan terdiri dari lima indikator sebagai berikut.

### **Publikasi laporan keuangan melalui website \***

- Tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui website
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap bulan

### **Publikasi laporan keuangan media massa \***

- Tidak melakukan publikasi laporan keuangan baik melalui media massa maupun media elektronik lainnya
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media sosial
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media sosial dan elektronik
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa, media sosial, dan elektronik

### **Penggunaan sistem informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) \***

- Tidak menggunakan SIMBA
- Menggunakan SIMBA / terkoneksi dengan SIMBA

### **Ketepatan waktu pelaporan \***

- OPZ tidak melaporkan
- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 1 tahun
- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 6 bulan
- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 3 bulan
- OPZ melakukan pelaporan tepat waktu

### **Opini auditor independen \***

- Tidak dilakukan audit eksternal
- Disclaimer
- Tidak Wajar
- Wajar dengan pengecualian
- **Wajar**

### Transparansi Manajemen

Pada dimensi transparansi manajemen terdiri dari enam indikator sebagai berikut.

#### **Standar operasional prosedur (SOP) dan standar ISO (Organization for Standardization) \***

- Tidak ada SOP
- Memiliki SOP
- **Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 1 ISO**
- Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 2 ISO
- Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 3 ISO

#### **Rencana Strategis Tahunan (RENSTRA) \***

- Tidak memiliki rencana strategis
- Memiliki rencana strategis dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- **Memiliki rencana strategis dan dilaporkan ke BAZNAS pusat**

#### **Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) \***

- Tidak memiliki RKAT
- Memiliki RKAT yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- Memiliki RKAT yang diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- Memiliki RKAT yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS pusat
- **Memiliki RKAT yang diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS pusat**

#### **Struktur organisasi : profil manajemen, profil member, dan sistem kepegawaian \***

- Tidak memiliki visi dan misi
- Memiliki visi misi dan struktur organisasi namun tidak terdokumentasi
- Memiliki visi misi, struktur organisasi, dan profil anggota namun tidak terdokumentasi

- Memiliki visi misi, struktur organisasi, dan profil anggota yang terdokumentasi
- Memiliki visi misi, struktur organisasi, profil anggota, serta sistem kepegawaian yang terdokumentasi

#### **Portal Informasi dan Dokumentasi Publik (PID) \***

- Tidak memiliki pejabat PID dan tidak memiliki portal informasi dan dokumentasi publik
- Tidak memiliki pejabat PID, namun memiliki portal informasi dan dokumentasi publik
- Memiliki pejabat PID, namun tidak memiliki portal informasi dan dokumentasi publik
- Memiliki pejabat PID, portal informasi dan dokumentasi publik, namun tidak memiliki informasi publik yang update
- Memiliki pejabat PID, portal informasi dan dokumentasi publik, dan memiliki informasi publik yang benar, akurat, mudah diakses, dan update

#### **Sistem Saluran Pengaduan \***

- Tidak ada saluran pengaduan
- Terdapat saluran pengaduan, tetapi tidak diumumkan ke publik
- Terdapat saluran pengaduan yang diumumkan ke publik

#### **Transparansi Program**

Pada dimensi transparansi program terdiri dari tujuh indikator sebagai berikut.

#### **Aktivitas penghimpunan (real-time) \***

- Tidak memutakhirkan data penghimpunan
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap tahun
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap 6 bulan
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap bulan
- Memutakhirkan data penghimpunan real-time

#### **Aktivitas penyaluran (real-time) \***

- Tidak memutakhirkan data penyaluran
- Memutakhirkan data penyaluran setiap tahun
- Memutakhirkan data penyaluran setiap 6 bulan
- Memutakhirkan data penyaluran setiap bulan
- Memutakhirkan data penyaluran real-time

**Database muzakki individu \***

- Tidak memiliki database muzakki individu
- Memiliki database muzakki individu tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database muzakki individu dan dimutakhirkan](#)

**Database muzakki badan \***

- Tidak memiliki database muzakki badan
- Memiliki database muzakki badan tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database muzakki badan dan dimutakhirkan](#)

**Database mustahik \***

- Tidak memiliki database mustahik
- Memiliki database mustahik tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database mustahik dan dimutakhirkan](#)

**Data pengumpulan \***

- Tidak terdapat data pengumpulan yang dirinci menurut jenis dana
- Terdapat data pengumpulan yang dirinci menurut jenis dana, namun tidak update
- [Terdapat data pengumpulan yang dirinci menurut jenis dana dan diupdate](#)

**Data Penyaluran \***

- Tidak terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana
- Terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana, namun tidak update
- [Terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana dan diupdate](#)

Instansi \*

[BAZNAS Kabupaten Kulon Progo](#)

[LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta](#)

Nama \*

Ira Rahmawati

Bidang / divisi \*

## Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

### Transparansi Keuangan

Pada dimensi transparansi keuangan terdiri dari lima indikator sebagai berikut.

#### **Publikasi laporan keuangan melalui website \***

- Tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui website
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap bulan

#### **Publikasi laporan keuangan media massa \***

- Tidak melakukan publikasi laporan keuangan baik melalui media massa maupun media elektronik lainnya
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media sosial
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media sosial dan elektronik
- Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa, media sosial, dan elektronik

#### **Penggunaan sistem informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) \***

- Tidak menggunakan SIMBA
- Menggunakan SIMBA / terkoneksi dengan SIMBA

#### **Ketepatan waktu pelaporan \***

- OPZ tidak melaporkan
- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 1 tahun
- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 6 bulan

- OPZ melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 3 bulan
- [OPZ melakukan pelaporan tepat waktu](#)

#### **Opini auditor independen \***

- Tidak dilakukan audit eksternal
- Disclaimer
- Tidak Wajar
- Wajar dengan pengecualian
- [Wajar](#)

#### **Transparansi Manajemen**

Pada dimensi transparansi manajemen terdiri dari enam indikator sebagai berikut.

#### **Standar operasional prosedur (SOP) dan standar ISO (Organization for Standardization) \***

- Tidak ada SOP
- [Memiliki SOP](#)
- Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 1 ISO
- Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 2 ISO
- Memiliki SOP yang distandardisasikan melalui 3 ISO

#### **Rencana Strategis Tahunan (RENSTRA) \***

- Tidak memiliki rencana strategis
- Memiliki rencana strategis dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- [Memiliki rencana strategis dan dilaporkan ke BAZNAS pusat](#)

#### **Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) \***

- Tidak memiliki RKAT
- Memiliki RKAT yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- Memiliki RKAT yang diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS pusat
- Memiliki RKAT yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS pusat
- [Memiliki RKAT yang diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS pusat](#)

### **Struktur organisasi : profil manajemen, profil member, dan sistem kepegawaian \***

- Tidak memiliki visi dan misi
- Memiliki visi misi dan struktur organisasi namun tidak terdokumentasi
- Memiliki visi misi, struktur organisasi, dan profil anggota namun tidak terdokumentasi
- Memiliki visi misi, struktur organisasi, dan profil anggota yang terdokumentasi
- **Memiliki visi misi, struktur organisasi, profil anggota, serta sistem kepegawaian yang terdokumentasi**

### **Portal Informasi dan Dokumentasi Publik (PID) \***

- Tidak memiliki pejabat PID dan tidak memiliki portal informasi dan dokumentasi publik
- **Tidak memiliki pejabat PID, namun memiliki portal informasi dan dokumentasi publik**
- Memiliki pejabat PID, namun tidak memiliki portal informasi dan dokumentasi publik
- Memiliki pejabat PID, portal informasi dan dokumentasi publik, namun tidak memiliki informasi publik yang update
- Memiliki pejabat PID, portal informasi dan dokumentasi publik, dan memiliki informasi publik yang benar, akurat, mudah diakses, dan update

### **Sistem Saluran Pengaduan \***

- Tidak ada saluran pengaduan
- Terdapat saluran pengaduan, tetapi tidak diumumkan ke publik
- **Terdapat saluran pengaduan yang diumumkan ke publik**

### **Transparansi Program**

Pada dimensi transparansi program terdiri dari tujuh indikator sebagai berikut.

### **Aktivitas penghimpunan (real-time) \***

- Tidak memutakhirkan data penghimpunan
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap tahun
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap 6 bulan
- Memutakhirkan data penghimpunan setiap bulan
- **Memutakhirkan data penghimpunan real-time**

### **Aktivitas penyaluran (real-time) \***

- Tidak memutakhirkan data penyaluran
- Memutakhirkan data penyaluran setiap tahun
- Memutakhirkan data penyaluran setiap 6 bulan
- Memutakhirkan data penyaluran setiap bulan
- [Memutakhirkan data penyaluran real-time](#)

### **Database muzakki individu \***

- Tidak memiliki database muzakki individu
- Memiliki database muzakki individu tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database muzakki individu dan dimutakhirkan](#)

### **Database muzakki badan \***

- Tidak memiliki database muzakki badan
- Memiliki database muzakki badan tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database muzakki badan dan dimutakhirkan](#)

### **Database mustahik \***

- Tidak memiliki database mustahik
- Memiliki database mustahik tetapi tidak dimutakhirkan
- [Memiliki database mustahik dan dimutakhirkan](#)

### **Data penghimpunan \***

- Tidak terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana
- Terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana, namun tidak update
- [Terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana dan diupdate](#)

### **Data Penyaluran \***

- Tidak terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana
- Terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana, namun tidak update
- [Terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana dan diupdate](#)

## Lampiran 2 Wawancara dilakukan via whatsapp

### A. Wawancara dengan pegawai BAZNAS Kulon Progo

Narasumber : Ira Rahmawati Divisi : Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Interviewer : Arum Maulina Hari, Tanggal : Senin, 3 Agustus 2020
Q : Apa alasan BAZNAS KP tidak mempublikasi laporan keuangan di website atau media sosial? A : Karena website BAZNAS KP baru masa pembenahan dan belum sempurna mbak, sedangkan untuk media masa kita melaporkan bentuk yang mudah dipahami oleh muzaki, mungkin kalau laporan keuangan mereka kurang memahami bahasanya. Jadi kita laporkan dalam bentuk yang mudah mereka pahami.
Q : Siapa saja nama pejabat PID BAZNAS KP? A : Pejabat PID secara ber-SK belum ada akan tetapi ada sraf yang menangani bagian itu, yakni staf bagian SDM dan umum yaitu Bapak Edi Kurniawan, beliau yang bertugas mengelola website dan media sosial.
Q : Saluran pengaduan BAZNAS KP itu yang mana bu? Soalnya di website tidak tertera saluran pengaduan BAZNAS KP, adanya BAZNAS pusat. A : Saluran pengaduan bisa lewat email, nomor layanan mustahik atau langsung ke pimpinan atau staf amil.
Q : setiap kapan laporan keuangan dilaporkan ke BAZNAS pusat? Apakah sebulan sekali atau berapa bulan sekali? A : Laporan keuangan dilaporkan ke BAZNAS pusat setiap semester mbak / 6 bulan sekali.

B. Wawancara dengan pegawai DD Yogyakarta

Narasumber : Meuthia Maharani Divisi : SPV Human Resources Operational Management Interviewer : Arum Maulina Hari, Tanggal : Senin, 17 Juli 2020
Q : kenapa DD tidak menggunakan sistem informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) mbak? Apakah DD sudah punya sistem informasi sendiri? A : kita udah ada sistem sendiri dek Q : oalah baik mbak, kalau sistem informasinya pake aplikasi apa mbak? A : yang hubungannya dengan donatur sistemnya namanya Desi. Kalau keuangan, pakai sistem accurate. Q: itu berarti terkoneksi dengan DD pusat juga ya mbak? A: Iya
Q : kenapa DD tidak memiliki pejabat PID? A : jadi kita timnya ada 3 divisi, a. tim program, b. tim marketing/remo, c. tim keuangan operasional dan HRD. Masing-masing itu kalau mau cari informasi sesuai divisinya. BAZNAS dan DD kan berbeda, kalau kita punya sistem sendiri. Untuk dokumentasi, kita di handle sama tim marketing.
<b>22 Juli 2020</b> Q : dulu saat DD mengisi kuisioner ka nada jawaban “memiliki SOP yang distandardisasikan 1 ISO.” Nah itu jenis ISO yang apa ya mbak? A : ISO 9001-2015
Q : DD kalau melaporkan keuangan ke pihak pemerintah (BAZNAS pusat/kemenag) berapa bulan sekali mbak? A : 6 bulan sekali.
<b>3 Agustus 2020</b>

Q : database muzaki dan mustahik di update berapa bulan sekali?

A : 3 bulan sekali..

### 18 Agustus 2020

Q : kalau LAZ itu dianjurkan menggunakan SIMBA atau tidak mbak? Dan kedepannya apakah tetap menggunakan sistem informasi sendiri atau menggunakan SIMBA juga?

A : engga pake samba dek, pake sistem informasi sendiri.

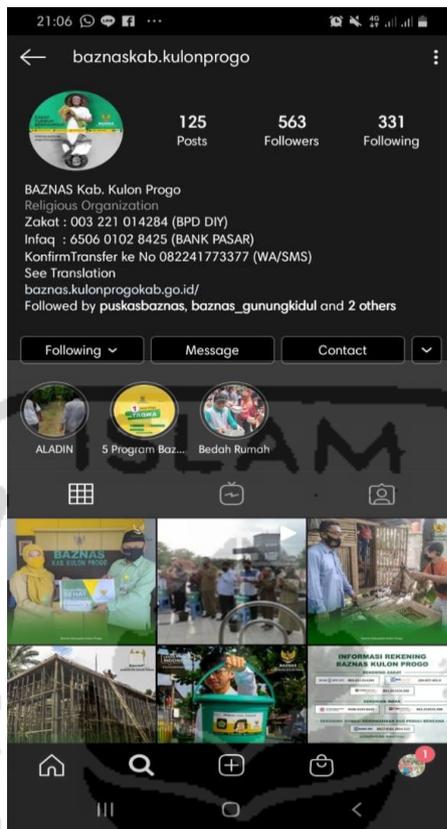
Q : SIMBA untuk LAZ tidak diwajibkan ya mbak?

A : iya dek.

### Lampiran 3 Portal Informasi dan Dokumentasi



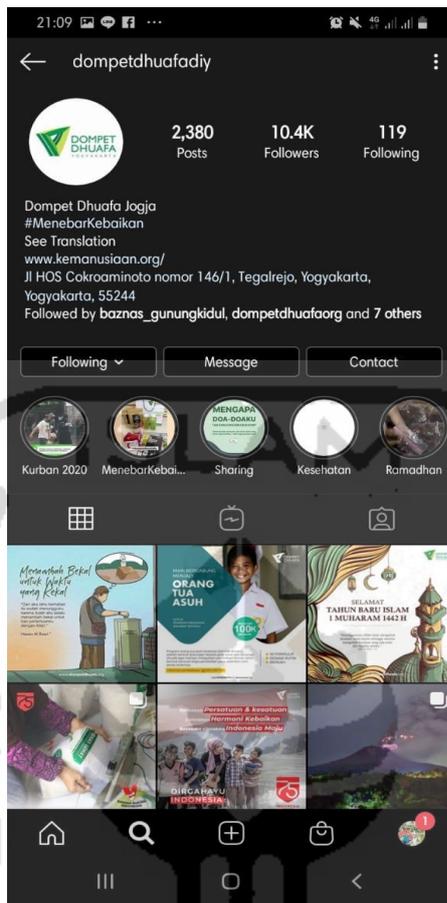
Gambar 5.1 Halaman website BAZNAS Kulon Progo



Gambar 5.2 Halaman media sosial (instagram) BAZNAS Kulon Progo



Gambar 5.3 Halaman website Dompot Dhuafa Yogyakarta



Gambar 5.4 Halaman media sosial (instagram) Dompeth Dhuafa Yogyakarta

## Lampiran 4 Saluran Pengaduan

**Kontak Kami**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulon Progo  
Alamat : Jl. Moch Dawam No. 39B Driyan Wates  
Telp. : (0274) 2890742, HP: 08121581546  
Website : [baznas.kulonprogokab.go.id](http://baznas.kulonprogokab.go.id)  
Email : [baznaskab.kulonprogo@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kulonprogo@baznas.go.id)

Anda bisa menghubungi kami melalui formulir yang disediakan di bawah ini.  
Terimakasih.

Nama :

Email :

Pesan :

Kode Keamanan :

Masukkan Kode di atas :



Gambar 5.5 Saluran Pengaduan BAZNAS Kulon Progo

**Hubungi Kami** Home > Hubungi Kami

**Dompot Dhuafa Jogja**  
Jl. HOS Cokroaminoto No.146,  
Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota  
Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55244  
4.6 ★★★★★ 60 reviews  
[View larger map](#)

**Art Florist Jogja**

**Jl. HOS Cokroaminoto No.146, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244**

**(0274) 5305450 | 0811 2511 785**

Senin-Jumat: 8:00 – 17:00  
Sabtu: 8:00 – 14:00

**Contact Us**

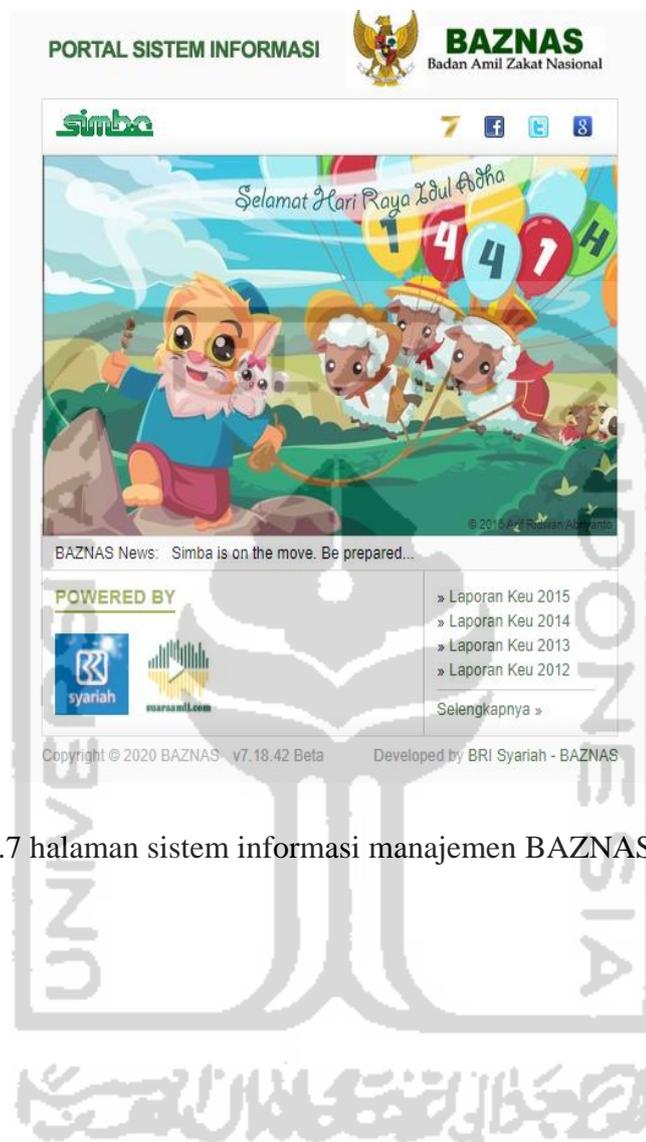
First and last name\*  Phone\*

Your Email\*  Subject

Your message\*

Gambar 5.6 Saluran Pengaduan DD Yogyakarta

## Lampiran 5 Sistem Informasi SIMBA



Gambar 5.7 halaman sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA)

**Lampiran 6 Skor Indikator Indeks Transparansi OPZ**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Skala Likert Pengukuran (1=sangat lemah, 2 = lemah, 3=cukup, 4 = kuat, 5 = sangat kuat)				
				1	2	3	4	5
1	Transparansi keuangan (X <sub>1</sub> )	Publikasi Laporan Keuangan (X1.1)	Laporan melalui Website	Tidak melakukan Publikasi laporan keuangan melalui website	Melakukan Publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui website sekurang-kurangnya setiap bulan
			Publikasi Media Massa	Tidak melakukan publikasi laporan keuangan baik melalui media massa, maupun media elektronik lainnya	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui Media sosial	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media sosial dan elektronik	Melakukan publikasi laporan keuangan melalui media massa, media sosial dan elektronik.
		Laporan Keuangan (X1.2)	Menggunakan SIMBA	Tidak Menggunakan SIMBA	-	-	-	Menggunakan SIMBA/Terkoneksi dengan SIMBA

			Ketepatan waktu pelaporan	Lembaga zakat tidak melaporkan	Lembaga zakat melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 1 tahun	Lembaga zakat melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 6 bulan	Lembaga zakat melakukan pelaporan tidak tepat waktu, terlambat dalam kurun waktu 3 tahun	Lembaga zakat melakukan pelaporan tepat waktu.
			Opini Auditor Independen	Tidak dilakukan audit eksternal	Disclaimer	Tidak Wajar	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar
2	Transparansi Manajemen (X <sub>2</sub> )	Tata Kelola (X <sub>2.1</sub> )	SOP dan ISO	Tidak ada SOP	Memiliki SOP	Memiliki SOP yang di standardisasikan melalui 1 ISO	Memiliki SOP yang di standardisasikan melalui 2 ISO	Memiliki SOP yang di standardisasikan melalui 3 ISO
			Rencana Strategis Tahunan	Tidak memiliki Rencana Strategis	-	Memiliki rencana strategis dan tidak dilaporkan ke BAZNAS Pusat	-	Memiliki rencana strategis dan dilaporkan ke BAZNAS Pusat
			Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Tidak memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS Pusat	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang diturunkan dari RENSTRA dan tidak dilaporkan ke BAZNAS Pusat	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang tidak diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS Pusat	Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang diturunkan dari RENSTRA dan dilaporkan ke BAZNAS Pusat

		Struktur Organisasi (X2.2)	Struktur Organisasi: Profil manajemen, profil member, sistem kepegawaian.	Tidak memiliki Visi dan Misi	memiliki Visi misi dan struktur organisasi namun tidak terdokumentasi	Memiliki Visi misi, struktur organisasi dan profile anggota yang terdokumentasi	Memiliki Visi misi, struktur organisasi dan profile anggota yang terdokumentasi	Memiliki Visi misi, struktur organisasi dan profile anggota serta sistem kepegawaian yang terdokumentasi
		Portal Informasi dan Dokumentasi Publik (X2.3)	Portal Informasi dan Dokumentasi Publik	Tidak memiliki pejabat PID dan tidak memiliki portal informasi dan Dokumentasi Publik	Tidak memiliki pejabat PID, namun memiliki portal informasi dan Dokumentasi Publik	memiliki pejabat PID, namun tidak memiliki portal informasi dan Dokumentasi Publik	memiliki pejabat PID, Portal Informasi dan Dokumentasi Publik, namun tidak memiliki Informasi Publik yang update	memiliki pejabat PID, Portal Informasi dan Dokumentasi Publik, dan memberikan Informasi Publik yang benar, akurat, mudah diakses dan up-to date
		Saluran Pengaduan (X2.4)	Saluran Pengaduan	Tidak ada saluran pengaduan	-	Terdapat saluran pengaduan, tetapi tidak diumumkan ke publik	-	Terdapat saluran pengaduan yang diumumkan ke publik
3	Transparansi Program (X3)	Aktivitas Realtime (X3.1)	Aktivitas Penghimpunan (Real-time)	Tidak memutakhirkan data penghimpunan	Memutakhirkan data penghimpunan setiap tahun	Memutakhirkan data penghimpunan setiap 6 bulan	Memutakhirkan data penghimpunan setiap bulan	Memutakhirkan data penghimpunan-realtime
			Aktivitas Penyaluran (Real-time)	Tidak memutakhirkan data penyaluran	Memutakhirkan data penyaluran setiap tahun	Memutakhirkan data penyaluran setiap 6 bulan	Memutakhirkan data penyaluran setiap bulan	Memutakhirkan data penyaluran-realtime

		Muzaki Individu	Tidak memiliki database muzaki individu	-	Memiliki database muzaki individu tetapi tidak dimutakhirkan	-	Memiliki database muzaki individu dan di mutakhirkan
		Muzaki Badan	Tidak memiliki database muzaki badan	-	Memiliki database muzaki badan tetapi tidak dimutakhirkan	-	Memiliki database muzaki badan dan di mutakhirkan
		Mustahik	Tidak memiliki database mustahik	-	Memiliki database mustahik tetapi tidak dimutakhirkan	-	Memiliki database mustahik dan di mutakhirkan
		Data Penghimpunan	Tidak terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana	-	Terdapat data penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana namun tidak update	-	Terdapat dara penghimpunan yang dirinci menurut jenis dana dan di update
		Data Penyaluran	Tidak terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana	-	Terdapat data penyaluran yang dirinci menurut jenis dana namun tidak update	-	Terdapat dara penyaluran yang dirinci menurut jenis dana dan di update

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tegal pada tanggal 13 September 1998 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Kholik dan Suharnaningsih. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Seseapan, Rt 02/04, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. HP: 083115871082. Alama e-mail: [arummaulina7@gmail.com](mailto:arummaulina7@gmail.com). Instagram: arummaulina\_. Pendidikan SMA ditempuh di SMAN 1 Balapulang, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

